

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014 SATKER PUSAT



**DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014**



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KUASA
PENGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN**

Nomor : 26/kpts/OT.160/G/I/2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANA PENGELOLAAN ANGGARAN SATKER DITJEN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL/KUASA PENGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pada Satker Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2014.
- b. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam bentuk petunjuk pelaksana.
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di pandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Tahun 2014 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

- Mengingat** : 1. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara



3. Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2005, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 jo Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5243/Kpts/KU.410/12/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
8. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Persetujuan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2014 Nomor : 018.07.1.560389/2014 tanggal 5 Desember 2013.



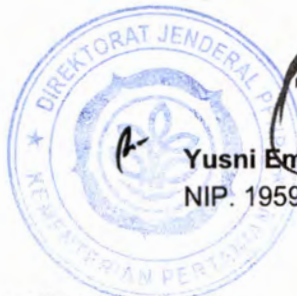
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Petunjuk Pelaksana Satker Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Petunjuk Pelaksana (Juklak) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, merupakan petunjuk bagi setiap unit kerja pelaksana, evaluasi dan pengendalian kegiatan;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2014

Direktur Jenderal PPHP,



Yusni Emilia Harahap
NIP. 19590322 198306 2 001

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta
4. Peringgal.



KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan TA. 2014 disusun sebagai penjabaran Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2014. Juklak juga merupakan dokumen pendukung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kinerja mencakup : (1) Pendahuluan; (2) Organisasi Pengelola Anggaran; (3) Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013; dan (4) Uraian Kegiatan dan Anggaran. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi seluruh perangkat kerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Pusat.

Diharapkan Petunjuk Pelaksanaan ini, dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan dan kinerja dalam pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun anggaran 2014.

Direktur Jenderal,




Yusni Emilia Harahap

NIP. 19590322 198306 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sasaran.....	2
BAB II ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN	3
2.1 Dasar Hukum	3
2.2 Organisasi	5
BAB III MONITORING DAN EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2013	9
3.1 Monitoring dan Evaluasi	9
3.2 Pengendalian	10
3.3 Pengawasan	11
3.4 Pelaporan.....	12
BAB IV URAIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	13
A. PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDARISASI	13
1. Rancangan SNI Produk Pertanian (1788.001.001).....	13
2. Kerjasama Standar Mutu dan Harmonisasi Standar Mutu (1788.005.011)	16
3. Harmonisasi Standar Mutu (1788.005.012).....	19
4. Pengembangan Standardisasi (1788.011.001).....	21
5. Penerapan Jaminan Mutu (1788.011.002)	25
6. Laboratorium Pengujian dan OKKPD (1788.011.003)	30
7. Pengawasan Jaminan Mutu (1788.011.004).....	35

8.	Harmonisasi Standar Mutu (1788.011).....	38
9.	Pengawasan Jaminan Mutu (1788.013.001).....	42
10.	Layanan Perkantoran (1788.994.001).....	43
B.	PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK (1789).....	49
1.	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga (1789.002).	49
2.	Optimalisasi Sistem Pemasaran Produk Pertanian.....	52
3.	Pengembangan Akses Pemasaran	52
4.	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Komoditas Pertanian	53
5.	Optimalisasi Pemasaran Beras Berlabel	56
6.	Akselerasi dan Sosialisasi Pengembangan Pasar Lelang.	57
7.	Evaluasi Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran.	58
8.	Laporan Kegiatan dan Pembinaan.	59
9.	Pengembangan Analisis Pasar Hasil Pertanian	63
10.	Pengembangan Sistem Informatika Pelayanan Informasi Pasar.	66
11.	Evaluasi Pengembangan Informasi Pasar.	68
12.	Kegiatan Pendukung Pengembangan Informasi Pasar.	70
13.	Sarana dan Kelembagaan Pasar.	71
14.	Layanan Perkantoran (1789.994).....	74
C.	PENGEMBANGAN PEMASARAN INTERNASIONAL (1790).....	79
1.1	Kerjasama Komoditi Regional dan Multilateral (1790.001.011)	79
1.2	Kerjasama Pemasaran Regional (1790.001.012)	82
1.3	Kerjasama Pemasaran Multilateral (1790.001.013)	85
1.4	Kerjasama Pemasaran Bilateral (1790.001.014)	87
1.5	Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/ UNCTAD (1790.001.015)	88
1.6	Pengembangan Pasar Ekspor Melalui Market Intelligence (1790.001.017)	89
1.7	Advokasi Minyak Sawit Berkelanjutan (1790.001.018)	90
2.1	Kerjasama Komoditi Bilateral, Regional dan Multilateral (1790.002.001)	91

2.2	Kerjasama Pemasaran Regional (1790.002.002)	96
2.3	Kerjasama Pemasaran Multilateral (1790.002.003)	97
2.4	Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Perdagangan IGG- FAO/UNCTAD (1790.002.004)	98
2.5	Akselerasi Ekspor Hortikultura ke Singapura (1790.002.005).....	99
3.1	Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan Internasional (1790.003.001)	100
3.2	Analisis Peluang Pasar Produk Pertanian (1790.003.002)	101
3.3.	Evaluasi Kebijakan Ekspor Impor Komoditi Pertanian (1790.003.003)	102
3.4	Harmonisasi Tarif Produk Pertanian (1790.003.004)	102
4.5	Fasilitasi Pengembangan Ekspor Produk Pertanian (1790.003.005)	103
3.6.	Monitoring Implementasi Kesepakatan Pemasaran Bilateral (1790.003.006)	104
3.7	Verifikasi Teknis Ekspor Produk Pertanian (1790.003.007).....	105
3.8	Advokasi Pemasaran Ekspor Produk Pertanian (1790.003.009)	106
3.9	Pembinaan dan Pengawasan Akselerasi Peningkatan Ekspor Pola Insentif Komoditi Pertanian (1790.003.010).....	107
4.0	Layanan Perkantoran (1790.994).....	108
4.1	Administrasi Kegiatan (1790.994.001)	108
D.	PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI (1791)	113
1.	Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan (1791.001.001)	113
1.1	Pemantapan Pengembangan Usaha dan Kemitraan Melalui Pola Insentif (1791.001.001)	113
1.2	Pembinaan Kemitraan, Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (1791.001.002)	114
1.3	Pengembangan Unit Layanan Informasi dan Promosi Rempah dan Jamu Indonesia (1791.001.003).....	120
2.	Pelayanan Pengembangan Investasi Sektor Pertanian\.....	121

2.1. Pelayanan Pengembangan Investasi Sektor Pertanian (1791.002.001)	121
3. Pameran, Promosi, Eksibisi dan Perlombaan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri	129
3.1 Promosi Luar Negeri (1791.003.001)	129
3.2 Promosi Dalam Negeri (1791.003.002)	140
4.1 Layanan Perkantoran (1791.994)	147
 E. PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (1792)	154
1. Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (1792.006.001)	154
1.1 Pengembangan Agroindustri Tanaman Pangan	154
1.2 Pembahasan Pengembangan Agroindustri Tepung Komposit	159
1.3 Pengawasan Pengembangan Pilot Program Agribisnis Perdesaan	162
2. Pengembangan Pengolahan Hortikultura (1792.006.002)	163
2.1 Pengawasan Pilot Program Agribisnis Perdesaan Berbasis Kelompok	163
2.2 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura	164
2.3 Fasilitasi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Hortikultura	164
2.4 Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Hortikultura	165
2.5 Pembinaan dan Pengawasan Agroindustri Hortikultura	166
3. Pengembangan Pengolahan Perkebunan (1792.006.003)	167
3.1 Pembahasan Pedoman, Bahan Kebijakan dan Standar Komoditi Perkebunan	167
3.2 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan Berbasis GMP	167
3.4 Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	168
3.5 Pembinaan dan Pengawasan Agribisnis Tanaman Tahunan	170
3.6 Pembinaan dan Pengawasan Agribisnis Tanaman Semusim	170
3.7 Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil Perkebunan	171
3.8 Pertemuan Koordinasi Teknis Pengolahan Bakar Bersih	172
3.9 Sosialisasi Pedoman Pengukuran Rendemen TBS	172

3.10	Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Perkebunan	173
3.11	Koordinasi Antar Instansi.....	174
4.	Pengembangan Pengolahan Peternakan (1792.006.004)	175
4.1	Temu Koordinasi Teknis Pengolahan Hasil Pertanian	175
4.2	Pembahasan Rancangan Standar Pengolahan Susu	175
4.3	Seminar Pengembangan Agroindustri Persusuan di Perguruan Tinggi	176
4.4	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Peternakan	177
4.5	Pembahasan Data Base Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan	178
4.6	Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	179
4.7	Pengawasan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan.....	179
4.8	Koordinasi Antar Instansi.....	180
4.9	Pembahasan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Peternakan.....	181
5.	Dukungan Manajemen (1792.994.001)	181
5.1	Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Direktorat	181
5.2	Penyusunan Rancangan Kegiatan Direktorat Tahun 2015	182
5.3	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.....	183
5.4	Pengembangan Data Base Sistem Informasi Pengolahan Pertanian	184
5.5	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat	185
5.6	Kegiatan Penunjang Direktorat.....	185
5.7	Gelar Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.....	186
5.8	Konsolidasi Direktorat Mendukung Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan SDM.....	187
F.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (1793.001).....	188
1.	Perencanaan Program (1793.001.001)	188
1.1	Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen PPHP.....	188
1.2	Penyusunan Usulan Inisiatif Baru Kegiatan PPHP	189

1.3	Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Program	189
1.4	Forum Komunikasi dan Asistensi Perencanaan Program serta Sinkronisasi antar kegiatan PPHP	190
1.5	Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015	191
1.6	Penyusunan Pedoman Perencanaan Kegiatan PPHP	192
1.7	Verifikasi Usulan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	192
1.8	Penyelenggaraan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2014	193
1.9	Kick Off Meeting Rencana Kerja Kegiatan Ditjen PPHP Tahun 2016	194
1.10	Perencanaan Pengembangan Daerah Khusus (Daerah Tertinggal, Konflik, Perbatasan, MP3KI, P4B dan MP3EI)	195
1.11	Review dan Penyusunan RENJA Ditjen PPHP	195
2.	Perencanaan Anggaran (1793.001.002)	196
2.1	Sosialisasi Pedoman Umum dan Penyerahan POK	196
2.2	Penyusunan Rancangan Anggaran dan Kegiatan 2015	197
2.3	Penyelesaian Revisi DIPA dan POK 2014	198
2.4	Penyusunan RKA-KL 2015	199
2.5	Pertemuan Penyusunan RKA-KL 2015	199
2.6	Penyusunan Pedoman Umum Ditjen PPHP 2015	203
2.7	Penyusunan dan pencetakan POK TA. 2015	204
2.8	Koordinasi dengan Instansi Terkait	204
2.9	Pelatihan RKA-KL Lingkup Direktorat	205
2.10	Review RKA-KL oleh Aparat Pengawasan Intern	206
3.	Kerjasama Program (1793.001.003)	206
3.1	Analisa Perkembangan Komoditi Internasional Untuk Penyusunan Program	206
3.2	Kerjasama Antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi	207
3.3	Pengawasan Implementasi PUG pada Program dan Kegiatan PPHP	208

3.4	Workshop Nasional Agwisata	209
3.5	Workshop Internasional Agwisata	209
3.6	E-Learning APO.....	210
4.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perbendaharaan (1793.001.004)	211
4.1	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Satker Pusat dan Daerah.....	211
4.2	Penyusunan JUKLAK dan JUKNIS	212
4.3	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	212
4.4	Inventarisasi Rekening Satker dan Verifikasi Usulan Pejabat Pengelola Keuangan	213
4.5	Penyusunan dan Penyelesaian Target PNBPN.....	214
4.6	Sinkronisasi dan Updating Gaji Pegawai.....	215
4.7	Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Satker Pusat	216
5.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan (1793.001.005) Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	217
5.1	Akurasi dan Verifikasi Data Barang Milik Negara.....	217
5.2	Sosialisasi Penyusutan dan Likuidasi BMN Pembinaan Aplikasi Barang Persediaan	218
5.3	Penyusunan Registrasi Inventaris BMN	218
5.4	Penertiban dan Penyelesaian DIR	219
5.5	Pemutakhiran Data Barang Milik Negara	220
5.6	Penyempurnaan Pedoman Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	221
5.7	Penertiban Satker Inaktif 2006 - 2012	222
5.8	Administrasi Pangadaan Barang dan Jasa Lingkup Ditjen PPHP	223
6.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Verifikasi dan Akutansi (1793.001.006).....	224
6.1	Koordinasi SAI	224
6.2	Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintah	225
6.3	Verifikasi dan Validasi Laporan Keuangan UAKPA dan UAPPA /E-1	226

6.4	Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited, Audited dan Reviu	227
6.5	Pembinaan dan Pemantauan SAI	228
7.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (1793.001.007)	229
7.1	Pengembangan Kualitas.....	229
7.2	Pengelolaan Kepegawaian	234
7.3	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana.....	236
7.4	Pengembangan Jabatan Fungsional	238
7.5	Reformasi Birokrasi	243
7.6	Apresiasi/Penyebaran Informasi di Bidang Organisasi dan Kepegawaian	245
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1793.001.008)	248
8.1	Pengembangan Peraturan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	248
8.2	Penyebaran Informasi.....	250
8.3	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.....	255
8.4	Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha.....	256
8.5	Publikasi Pembangunan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Pertanian	257
8.6	Pengelolaan TU dan Rumah Tangga	258
8.7	Pengawasan dan Supervisi Pimpinan	263
8.8	Pengelolaan Data dan Informasi (1793.001.011).....	264
8.9	Pengembangan Sistem Informasi	266
9.	Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (1793.001.012)	269
9.1	Penyusunan Laporan Kegiatan Ditjen PPHP	269
9.1	Penyusunan LAKIP.....	270
9.2	Pengawasan Kinerja dan Tindak Lanjut Pengawasan	271
9.3	Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	272
10.	Evaluasi (1793.001.013).....	273
10.1	Pertemuan Evaluasi Awal Regional di 2 Lokasi	273
10.2	Pertemuan Evaluasi Pembangunan PPHP (Nasional).....	274

10.3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan PPHP	275
10.4 Evaluasi Pencapaian Outcome Program Peningkatan NTDS (studi kasus)	276
10.5 Pembuatan Sistem Informasi Pencapaian Outcome Program Peningkatan NTDS	277
11. SL-PPHP (1793.001.021)	278
11.1 PL-1	278
12. Pembinaan Kegiatan Strategis (1793.001.023)	278
12.1 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Strategis	278
12.2 Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP)	279
13. Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Melalui LM 3 (1793.002)	280
BAB V PENUTUP	283



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembenahan anggaran negara, merupakan salah satu bentuk perubahan dalam pengelolaan Keuangan Negara, merujuk pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul kemudian dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka diperlukan langkah-langkah operasional yang harus ditempuh guna mempermudah mewujudkan pencapaian sasaran program pembangunan nasional secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

Kebijakan terhadap perubahan dan rencana pencapaian sasaran program pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dapat dijabarkan menjadi lebih operasional, terstruktur dan terukur serta berbasiskan kepada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Sejalan dengan perubahan tersebut jajaran pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dituntut untuk meningkatkan aktualisasi kemampuan diri guna mengembangkan potensi dan inovasi kegiatan yang produktif dalam rangka memberdayakan kelompok tani/gapoktan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan menggerakkan pertumbuhan perekonomian perdesaan.

Pengelolaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang di dukung oleh 6 (enam) unit kerja eselon II dan 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Penanganan Pasca Panen, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian,

Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Pemasaran Domestik, Direktorat Pemasaran Internasional serta Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian (BPMA).

Untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan/anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta guna mendukung pelaksanaannya, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan dan Anggaran Kinerja Tahun Anggaran 2011 yang memuat pengukuran kinerja dan anggaran diukur dan dimulai berdasarkan atas indikator kegiatan, tujuan, sasaran, pelaksanaan kegiatan, output, outcome, benefit, dan impact.

1.2 Tujuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh jajaran pelaksana program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta ketentuan yang berlaku.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksana ini adalah :

- a. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- b. Terarahnya pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Tercapainya sasaran dan output program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
- d. Terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran pembangunan pengolahan dan pemasaran di semua jenjang pelaksanaan.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN

2.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomo 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang dilengkapi dengan Perdirjen Perbedaharaaan Nomor PER-22/PB/ 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- m. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 6456/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- n. Keputusan Sekretaris Direktur Jenderal/Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 01/Kpts/KP.510/G.1/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan telah direvisi menjadi Nomor 21/Kpts/KP.510/G.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggungjawab Satuan Pelaksana, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun Anggaran 2013.

- o. Surat Menteri Keuangan Nomor 018.07.1.560389/2013 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- p. Petunjuk Operasional Keuangan (POK) Pusat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2013;
- q. Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2013;
- r. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2013

2.2 Organisasi

Pola pengorganisasian program dan anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian termasuk salah satu penentu arah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Dengan adanya penataan organisasi yang mantap dan pengelolaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Mekanisme kontrol sekaligus pembinaan terhadap implementasi kegiatan berdasarkan program dan anggaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

"Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian bertanggungjawab atas keberhasilan program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian secara nasional dan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi secara nasional."

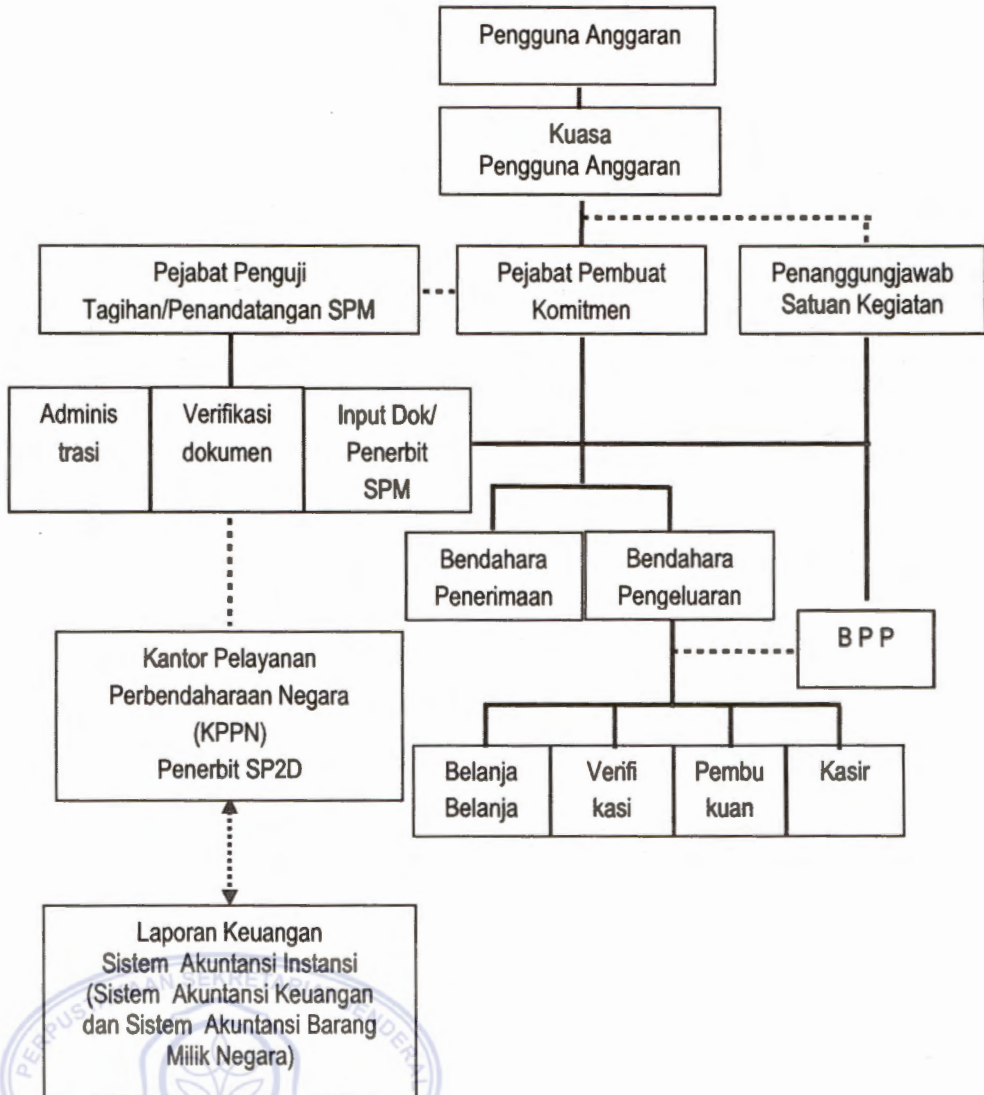
Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan peningkatan jaringan kerja melalui hubungan hierarki dan teknis fungsional. Jaringan kerja dimaksud sebagai berikut :

1. Menteri Pertanian sebagai penanggungjawab Program Pembangunan Pertanian.
2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Pembina Program dan Anggaran Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pusat bertugas sebagai pelaksana sehari-hari, kegiatan program dan anggaran kinerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Direktur sebagai penanggungjawab satuan kegiatan, eselon III selaku penanggung jawab kegiatan dan eselon IV selaku pelaksana kegiatan.

Dalam pengelolaan anggaran satuan kerja pusat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menggunakan pengorganisasian anggaran sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2013**



Rekonsiliasi

Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran menetapkan/mengangkat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satker Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6456/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, KPA mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penanggungjawab Satuan Pelaksana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui keputusan Sekretaris Direktur Jenderal/Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 01/Kpts/KP.510/G/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang kemudian direvisi menjadi Nomor 21/Kpts/KP.510/G.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggungjawab Satuan Pelaksana, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun Anggaran 2013.



BAB III
MONITORING DAN EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2013

3.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator kinerja alat ukur kerangka logis yang meliputi input, output, outcome, benefit dan impact. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauhmana kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi mencakup :

- a. Memonitor perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- b. Mengidentifikasi sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta memberikan solusinya.
- c. Mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- d. Melakukan evaluasi dan menganalisis pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam POK.
- e. Menganalisis kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan.
- f. Memberikan masukan bagi penyempurnaan perencanaan yang akan datang.



Perlu disadari bahwa daya guna dan hasil guna sistem pengukuran kinerja tergantung pada hasil identifikasi, pemantauan, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara baik dan cermat serta didukung validitas data/informasi yang akurat. Pengukuran kinerja merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan analisis kinerja secara terus menerus untuk diperoleh bukti adanya akurasi, kelengkapan dan kegunaannya.

Adapun pentingnya indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk memperjelas status, jenis, kuantitas dan waktu suatu kegiatan dilaksanakan.
- b. Membangun konsensus, untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi yang melaksanakannya.
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu instansi/organisasi.

3.2 Pengendalian

Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan pengendalian oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PPHP selaku KPA, dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan sasaran yang ingin dicapai.
- b. Mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusinya.
- c. Mencegah, mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana serta sasaran yang ingin dicapai.
- d. Memberikan solusi dan atau pemecahan masalah terhadap kendala dan permasalahannya yang ada serta melakukan koreksi-koreksi sepanjang batas kewenangannya.

- e. Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan evaluasi akhir kegiatan.

3.3 Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, selain keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksana. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.

Kegiatan pengawasan fungsional pembangunan pertanian masih tetap dilaksanakan secara intern oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Pengawasan fungsional kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pertanian secara eksternal juga dilakukan oleh aparatur pengawasan seperti BPK dan BPKP. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

1. Pemeriksaan kinerja aparat pengelola kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan anggaran yang telah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya memperhatikan azas kepatutan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemeriksaan yang mengarah pada pelaksanaan wewenang sesuai tupoksi, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum sehingga dapat merekomendasikan penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang.
3. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan wewenang dan tupoksi tersebut.
4. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan atas suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat. Pemeriksaan ini untuk

- pengembangan dari pemeriksaan regular yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk segera diselesaikan maksimal 30 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan di terima.

3.4 Pelaporan

Pelaporan hasil kegiatan dan anggaran merupakan suatu bentuk penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui pelaporan ini juga akan dapat dilihat sejauhmana tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2006 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Satker wajib membuat Laporan Keuangan menggunakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) yang terdiri dari laporan Sistem Akutansi Keuangan (SAK) yang dititik beratkan pada pelaporan perkembangan keuangan dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara (SABMN) yang dititik beratkan pada perkembangan barang inventarisasi.

Sesuai dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan aparat pelaksana kegiatan wajib membuat laporan secara berjenjang. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka efektivitas dan efisiensi, maka penanggungjawab kegiatan dan satuan kerja wajib menyampaikan laporan secara berkala, yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Laporan kinerja akan dievaluasi dan dijadikan sebagai bahan masukan / bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah).

BAB IV

URAIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDARISASI

1. Rancangan SNI Produk Pertanian (1788.001.001)

1.1 Pengembangan SNI

1.1.1 Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian Standar Sektor Pertanian

Output

Analisa kebutuhan dan kesesuaian standar sektor pertanian

Outcome

Terpenuhinya syarat mutu produk pertanian yang ada dilapangan terhadap parameter yang ditetapkan dalam SNI Beras, Jagung dan Kedelai.

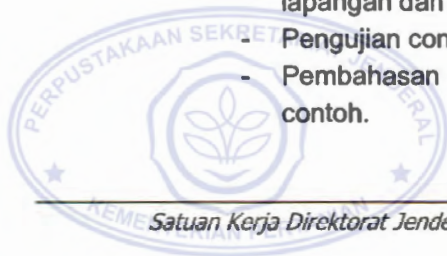
Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah analisa kebutuhan dan pemenuhan kesesuaian standar produk pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 324.250.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Kunjungan lapangan melihat kondisi mutu produk di lapangan dan pengambilan contoh
- Pengujian contoh
- Pembahasan hasil kunjungan lapangan dan pengujian contoh.



Analisa Resiko

- SNI yang dihasilkan tidak berkualitas.

1.1.2 Fasilitas Kesekretariatan PT/SPT Perumusan SNI

Output

- Finalisasi usulan PNPS 2013, rencana perumusan SNI tahun 2013 dan usulan PNPS 2014 sektor pertanian baik produk, benih/bibit, sarana dan prasarana maupun metode pengujian
- Dokumen RSNI3/RSNI4 yang telah diperbaiki (dokumen RSNI) dan
- Buku SNI

Outcome

Terumuskannya SNI Tahun 2013 dan usulan PNPS 2014 sektor pertanian produk, benih/bibit, sarana dan prasarana maupun pengujian.

Indikator kinerja kegiatan

- Pertemuan Koordinasi PT dan SPT untuk perumusan SNI pengusulan rancangan dalam PNPS, Pelaksanaan perumusan SNI dan pembahasan progres perumusan SNI yang diusulkan dalam PNPS.
- Verifikasi hasil e-balloting untuk memverifikasi RSNI3/RSNI4 sektor pertanian dari hasil jajak pendapat tersebut dimasukkan terkait RSNI3/RSNI4 untuk selanjutnya diperbaiki dengan konseptor pihak terkait.
- Penggandaan SNI.



Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mendukung kegiatan fasilitas kesekretariatan perumusan SNI diperlukan data PNPS dan PT/SPT dan Ditjen Tehnis dan akan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran Rp. 300.000.000,-sedangkan keluaran kegiatan ini meliputi sebagai berikut :

- Finansial usulan PNPS 2013, perumusan SNI 2014 dan usulan PNPS 2015, sector pertanian baik produk, benih/bibit sarana dan prasarana metode pengujian;
- Dokumen RSNI3/RSNI4 yang telah diperbaiki dan
- Buku SNI.

Analisa Resiko

Tujuan yang ingin diperoleh melalui koordinasi dan verifikasi hasil e-balloting ini tidak maksimal

1.1.3 Perumusan SNI

Output

Tersusunnya rancangan SNI sebanyak 27 dokumen.

Outcome

Ditetapkannya tahapan pelaksanaan untuk masing-masing komponen kegiatan sebagai berikut rancangan SNI yang telah dirumuskan menjadi SNI oleh BSN.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola, dengan anggaran Rp.450.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Teknis
2. Pelaksanaan Konsensus.



Analisa Resiko

Mungkin SNI yang dihasilkan kurang berkualitas dikarenakan kurangnya kajian lapangan, kurangnya referensi normative yang relevan dan uptodate.

2. Kerjasama Standar Mutu dan Harmonisasi Standar Mutu (1788.005.011)

2.1.1 Kerjasama Mutu dan Standardisasi

Output

Peningkatan Mutu dengan penerapan sistem keamanan pangan.

Outcome

Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Standardisasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Indikator Kinerja Kegiatan

Terjalinnya kerjasama standar komoditi pertanian dengan negara mitra.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola, dengan anggaran Rp.180.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Pembuatan Laporan.

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.



2.1.2 Kerjasama Standardisasi untuk ASEAN Pesticide Residue Data Generation.

Output

Penguatan tata hubungan saling pengakuan antara Pemerintah dengan Negara tujuan ekspor melalui *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*

Outcome

Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Standardisasi Komoditi Pertanian dengan Negara Anggota ASEAN
Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 365.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Pembuatan Laporan.

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

Indikator kinerja kegiatan

Tersampainya posisi dan kepentingan Indonesia berdasarkan usulan dan masukan dari instansi maupun *stake holder* terkait yang akan disampaikan dalam forum internasional.



2.1.3 Kerjasama Capacity Building On Food Safety Risk Analysis.

Output

Laporan kerjasama Capacity Building On Food Safety Risk Analysis

Outcome

Terciptanya kerjasama *Capacity Building On Food Safety Risk Analysis* komoditi pertanian melalui penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP), *Good Handling Practice* (GHP), *Good Manufacturing Practice* (GMP), dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).

Indikator kinerja kegiatan

Terjalannya kerjasama keamanan pangan dengan negara mitra dalam forum bilateral, regional dan internasional.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Pembuatan Laporan.

Analisa Resiko

Penetapan peserta kurang tepat dan kurang optimalnya sehingga pelaksanaan Capacity Building On Food Safety Risk Analysis



3. Harmonisasi Standar Mutu (1788.005.012)

3.1.1 Fasilitas Sidang Standar Pangan Internasional dan Codex.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersampainya posisi dan kepentingan Indonesia berdasarkan usulan dan masukan dari instansi maupun *stake holder* terkait yang akan disampaikan dalam forum internasional.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan secara swakelola dengan tahapan kegiatan sebagai berikut dengan anggaran Rp. 100.998.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Pembahasan dan penyusunan
- Penyusunan, pencetakan
- Penggandaan laporan.

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

3.1.2 Harmonisasi Standar Regional Komoditi Pertanian

Output

Laporan Harmonisasi Standar Regional dan Internasional

Outcome

Terlaksananya Peningkatan Harmonisasi Standar Regional dan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan

Terjalin kerjasama harmonisasi standar regional dengan negara ASEAN, Asia dan Eropa

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Pembahasan dan penyusunan
- Pengembangan

Analisa Resiko

Kurang optimalnya pelaku usaha maupun instansi terkait dalam penyusunan dan pembahasan posisi Indonesia dalam forum sidang bilateral dan regional sehingga tidak terakomodirnya kepentingan Indonesia dalam forum tersebut.

3.1.3 Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Mutu Produk Ekspor Melalui Kerjasama Trade Support Program (TSP) II

Output

Laporan fasilitasi pengembangan infrastruktur mutu produk ekspor melalui kerjasama Trade Support Program (TSP) II.

Outcome

Terwujudnya infrastruktur mutu komoditi pertanian yang mampu berdaya saing di pasar domestik, regional dan internasional.

Indikator Kinerja Kegiatan

Terjalannya kerjasama standar mutu komoditi pertanian dengan uni eropa.



Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 412,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan
- Mengidentifikasi, Membahas
- Memberi jawaban/tanggapan

Analisa Resiko

Lokasi dan peserta kegiatan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan komoditi sampel tidak dalam amsa panen sehingga peserta tidak memahami mekanisme treacibility asesment dan GAP asesment.

4. Pengembangan Standardisasi (1788.011.001).

4.1.1 Penyusunan Kebijakan Mutu dan Standardisasi.

Output

Laporan kegiatan penyusunan rancangan Permentan

Outcome

Penerapan Permentan dan tersedianya kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK

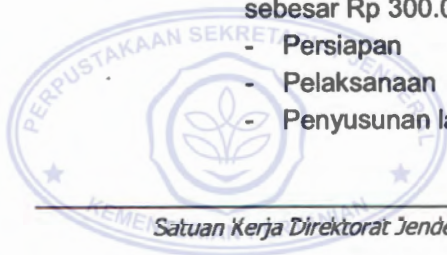
Indikator kinerja kegiatan

Jumlah konsep kebijakan tentang mutu dan standardisasi yang tersusun.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan



Analisa Resiko

Konsep Permentan tidak disepakati oleh stakeholder pada waktu pembasahan sehingga konsep tertunda penetapannya.

4.1.2 Sosialisasi Mutu dan SNI

Output

Terlaksananya sosialisasi Mutu dan SNI sektor pertanian dan kebijakan mutu dan standardisasi kepada pembina mutu dan stakeholder terkait.

Outcome

Peningkatan koordinasi program kegiatan mutu dan standardisasi pemerintah pusat dan daerah.

Indikator kinerja kegiatan

Jumlah pemangku kepentingan yang ditingkatkan kemampuannya dalam bidang mutu dan standardisasi pertanian.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 350,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Koordinasi
- Persiapan
- Pelaksanaan sosialisasi
- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Peserta yang hadir tidak tepat sasaran dan narasumber yang tidak kompeten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.

4.1.3 Pengawasan Program Standardisasi.

Output

Laporan kegiatan pengawasan program standardisasi

Outcome

Terlaksananya kegiatan dekonsentrasi sesuai sasaran yang diharapkan

Indikator kinerja kegiatan

Pelaku usaha menerapkan standar mutu yang harmonis dengan standar internasional tujuan ekspor

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran Rp.135.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

- o Lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan standar dan regulasi teknis negara tujuan ekspor
- o Kurangnya kemampuan teknis para pembina mutu dalam memfasilitasi harmonisasi standar dan regulasi teknis negara tujuan ekspor untuk diterapkan oleh pelaku usaha.

4.1.4 Pengawasan Pemberlakuan Regulasi Teknis.

Output

Laporan pengawasan pemberlakuan regulasi teknis



Outcome

Terlaksananya pengawalan pemberlakuan regulasi teknis

Indikator kinerja kegiatan

Jumlah pelaksanaan pengawalan program standardisasi

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran Rp.200.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan pedoman teknis
- pelaksanaan
- pengawalan
- penyusunan laporan

Analisa Resiko

Peserta yang hadir pada pertemuan teknis tidak tepat sasaran dan narasumber yang tidak kompeten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.

**4.1.5 Fasilitasi Sidang Working Group On Halal (WG-HAPAS),
IMT-GT.**

Output

Laporan Sidang Working Group On Halal

Outcome

Terfasilitasinya kerjasama dalam bidang halal melalui harmonisasi standard an sertifikasi halal antara Negara anggota

Indikator kinerja kegiatan

Jumlah pelaksanaan Sidang Working Group On Halal

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran Rp.240.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- pelaporan

Analisa Resiko

Pelaksanaan Sidang Working Group On Halal Tujuan tidak maksimal sehingga tujuan yang ingin diperoleh tidak tercapai.

5. Penerapan Jaminan Mutu (1788.011.002)

5.1.1 Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Output

Fasilitator sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang kompeten

Outcome

Terbimbingnya pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya Fasilitator Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 320,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan berupa identifikasi dan inventarisasi data calon peserta fasilitator dari Provinsi dan penyusunan materi
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi berupa bimbingan teknis Fasilitator Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

- Dinas Pertanian tidak mengirimkan peserta untuk kegiatan bimbingan teknis sebagai fasilitator jaminan mutu keamanan pangan
- Peserta tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan
- Jumlah peserta tidak sesuai dengan target

5.1.2 Penyusunan dan Penggandaan Data Base Jaminan Mutu Keamanan Pangan (JMKP).

Output

Data base jaminan mutu keamanan pangan

Outcome

Tersusunnya data base jaminan mutu keamanan pangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 60,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- pelaporan

Analisa Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lingkup Direktorat PHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.1.3 Pengawasan Kegiatan Perigembangan Mutu Komoditas Strategis

Output

Terlaksananya kegiatan-kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan baik

Outcome

Terbimbingnya pelaku usaha dalam sistem jaminan mutu keamanan pangan dan sistem pangan organik

Indikator kinerja kegiatan

- Pedoman teknis bimbingan organik, pedoman teknis penerapan JMKP, pedoman teknis pengembangan mutu kakao fermentasi, pedoman teknis pengembangan mutu kopi, pengawasan keamanan pangan
- Pendampingan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan seluruh Indonesia (sampling)
- Monitoring dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan dan penggandaan pedoman teknis organik, pedoman teknis penerapan JMKP, pedoman teknis pengembangan mutu kakao fermentasi, pedoman teknis pengembangan mutu kopi, pedoman teknis pengawasan keamanan pangan
- Pengawasan pengembangan pengawasan komoditas strategis keseluruhan Provinsi penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- Monitoring dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi pembinaan dan sertifikasi organik, penerapan JMKP, pengembangan mutu kakao fermentasi, pengembangan mutu kopi, dan pengawasan keamanan pangan.



Analisa Resiko

- Dinas Pertanian tidak mengirimkan peserta untuk kegiatan bimbingan teknis sebagai fasilitator jaminan mutu keamanan pangan
- Peserta tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan
- Jumlah peserta tidak sesuai dengan target

5.1.4 Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Komoditi Strategis.

Output

Data base jaminan mutu keamanan pangan (JMKP)

Outcome

Perkembangan penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan di tingkat pelaku usaha dan dampak yang ditimbulkannya.

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian khususnya penerapan sistem jaminan mutu, keamanan pangan dan organik.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 175,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

5.1.5 Bulan Mutu

Output

Terselenggaranya bulan mutu

Outcome

Perkembangan penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan di tingkat pelaku usaha dan dampak yang ditimbulkannya kepada masyarakat umum ataupun stakeholder.

Indikator kinerja kegiatan

- Terselenggaranya pameran
- Terselenggaranya penyerahan sertifikat dan penghargaan
- Terselenggaranya apresiasi
- Tersosialisasikannya issue-issue penting dibidang pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 360,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Koordinasi
- Tahap persiapan pelaksanaan bulan mutu
- Tahap pelaksanaan kegiatan

Analisa Resiko

- Peserta yang hadir terbatas/tidak memenuhi target
- Peserta yang ditugaskan tidak mengikuti kegiatan bulan mutu secara keseluruhan
- Peserta yang ditugaskan bukan orang yang tepat dalam pengendalian program di dinasnya masing-masing.



5.1.6 Fasilitas Penerapan ISO 9001 : 2008.

Output

Surveillance ISO 9001:2008 lingkup Direktorat Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP

Outcome

Terlaksananya Surveillance ISO 9001:2008 lingkup Direktorat Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Mutu dan Standardisasi dapat berjalan dengan baik karena kegiatan dapat ditelusuri masalah dan keberhasilannya.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.100,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik

6. Laboratorium Pengujian dan OKKPD (1788.011.003)

6.1.1 Fasilitas Pengembangan Laboratorium Pengujian

Output

Pengembangan laboratorium pengujian

Outcome

Terfasilitasinya Pengembangan laboratorium pengujian

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya laboratorium pengujian mutu produk pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 509,500,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Identifikasi, koordinasi, pendampingan dan monitoring
- Apresiasi dan fasilitasi penyiapan lembaga penilai kesesuaian

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik

6.1.2 Fasilitasi Kesekretariatan OKPO

Output

Terlaksananya kegiatan fasilitasi kesekretariatan otoritas komponen pangan organik (OKPO) dan tersusunya kebijakan untuk pengembangan organik di Indonesia.

Outcome

Kesekretariatan otoritas kompeten pangan organik (OKPO) dapat berjalan dengan baik.

Indikator kinerja kegiatan

Terciptanya jaringan kerjasama antara OKPO dengan OKKP-D

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 533,765,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Terususunnya direktori organik yang update
- Terdaftarnya LSO
- Terinformasikannya kebijakan pangan organik
- Terekomendasikannya integritas produk organik impor

Analisa Resiko

Tidak adanya persamaan persepsi atau pemahaman yang benar tentang SNI 01.6729 (system pangan organik) oleh stakeholder.

6.1.3 Sosialisasi Keamanan Pangan dalam rangka Peningkatan NTDS.

Output

Laporan sosialisasi keamanan pangan dalam rangka peningkatan NTDS

Outcome

Terlaksananya Laporan sosialisasi keamanan pangan dalam rangka peningkatan NTDS

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 114,915,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik

6.1.4 Fasilitasi Pengembangan OKKP-D

Output

Meningkatnya kredibilitas OKKP-D dan nilai tambah serta daya saing produk segar.

Outcome

LPK dan OKKP-D sebagai infrastruktur penunjang standardisasi pertanian.

Indikator kinerja kegiatan

Terciptanya jaringan kerjasama antara OKPO dengan OKKP-D

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 754.200.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Rapat koordinasi OKKP-D
- Rapat identifikasi OKKP-D
- Rapat konsolidasi OKKP-D
- Temu Teknis OKKP-D
- Pengembangan OKKP-D

Analisa Resiko

Belum adanya sinkronisasi dan kerjasama antara OKPO dengan OKKP-D



6.1.5 Peningkatan Kompetensi SDM Auditor Mutu Keamanan Pangan

Output

Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM auditor jaminan mutu dan keamanan pangan dan meningkatnya pengetahuan personel OKKP-D dan LS Pro serta tersusunnya laporan kegiatan peningkatan SDM/auditor jaminan mutu dan keamanan pangan.

Outcome

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi personel OKKP-D dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu melalui kegiatan pelaksanaan audit internal.

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya jumlah inspektor jaminan mutu, seiring meningkatnya jumlah lembaga sertifikasi dan pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 381,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Audit Internal
- Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh
- Bimbingan Teknis Inspektor Keamanan Pangan

Analisa Resiko

Apabila kebijakan dan standar dibidang pertanian yang telah ditetapkan tidak dapat diterapkan dan diguanakn baik oleh stakeholder.

7. Pengawasan Jaminan Mutu (1788.011.004)

7.1.1 Fasilitasi Kesekretariatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)

Output

Terbentuknya Sekretariat OKKP-P

Outcome

Terbimbingnya stakeholder dalam OKKP-P

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksannaya kesekretariatan OKKP-P dalam mendukung program keamanan pangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisa Resiko

- Terbatasnya sarana kerja
- Kehadiran anggota komtek yang tidak kourum
- Kurang/tidak adanya persamaan persepsi terhadap skema penilaian
- Belum tersedianya pedoman yang baku
- Anggota tim penyusun tidak terwakili dari seluruh pemangku kepentingan
- Keterbatasan acuan kerja
- Ketidakteragaman pemahaman dalam proses penilaian dalam rangka verifikasi, sertifikasi dan registrasi



- Keterbatasan ketersediaan sarana dan keahlian personel di bidang IT

7.1.2 Penyusunan Regulasi Sistem Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Output

Draft Permentan Sistem Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Outcome

Menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 100,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan Pelaporan

Analisa Resiko

- Kurang/tidak adanya persamaan persepsi terhadap draft permentan
- Anggota tim penyusun tidak terwakili dari seluruh pemangku kepentingan
- Keterbatasan acuan kerja



7.1.3 Pengembangan Kompetensi Profesional Pengawas Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP)

Output

Terselenggaranya penilaian kompetensi professional JMKP.

Outcome

Menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan jabfung PMHP.

Indikator kinerja kegiatan

Berkembangannya kompetensi JMKP dalam mendukung program keamanan pangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 200,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan Pelaporan

Analisa Resiko

Terbatasnya sarana kerja dan keterbatasan acuan kerja

7.1.4 Fasilitasi Kesekretariatan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

Output

Terselenggaranya penilaian DUPAK PMHP, Rapat Pleno, terpenuhinya database PMHP dan pertemuan jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian

Outcome

Menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan jabfung PMHP



Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya kesekretariatan PMHP dalam mendukung program keamanan pangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 350,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan Pelaporan

Analisa Resiko

- Terbatasnya sarana kerja
- Pemahaman Jabfung PMHP dalam menuangkan butir-butir kegiatan ke dalam DUPAK tidak sesuai Juknis
- Pemahaman Tim Penilai belum sama persepsinya dalam menilai DUPAK
- Belum tersedianya pedoman yang baku
- Kehadiran anggota tim penilai tidak kourum
- Data dari masing-masing Unit Kerja Pusat dan Daerah tidak lengkap dan tidak akurat
- Keterbatasan acuan kerja
- Keterbatasan ketersediaan sarana dan keahlian personel di bidang IT

8. Harmonisasi Standar Mutu (1788.011)

8.1.1 Fasilitas Kesekretariatan CODEX

Output

Terlaksananya peningkatan Harmonisasi Standar Internasional

Outcome

Indikator kinerja kegiatan

Tersampaiannya posisi dan kepentingan Indonesia berdasarkan usulan dan masukan dari instansi maupun *stake holder* terkait.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.250,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan
- Fasilitasi penyediaan
- Kajian ilmiah/fasilitasi pembahasan data

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

8.1.2 Fasilitasi Kegiatan Sanitary dan Phytosanitary (SPS)

Dalam rangka Mendukung Indonesia Rapid Alerts System for Food and Feed (INRASFF).

Output

Terlaksananya peningkatan harmonisasi standar internasional

Outcome

Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya operasionalisasi SPS *notification body*

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 65,000,000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahap persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Pelaksanaan Pengembangan SDM Fasilitator dan Auditor Internal Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan.

8.1.3 Fasilitas Kajian Residu Bahan Kimia Pangan Segar Hasil Pertanian

Output

Terlaksananya kajian residu pestisida produk pertanian sebagai data dukung pemetaan keamanan pangan produk segar pertanian, peningkatan nilai dan daya saing produk pertanian di pasar domestik dan internasional, penyusunan regulasi teknis serta perlindungan konsumen, mendukung partisipasi di forum standar regional (ASEAN, APEC, dll) dan internasional (mis. Codex)

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya data ilmiah kandungan residu pestisida pada produk pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola di Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta para stakeholders yang terkait dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Workshop pembekalan teknis kepada para Petugas Pengambil Contoh tentang pengambilan contoh untuk pengujian residu pestisida sesuai *Recommended*

Methods Of Sampling For The Determination Of Pesticide Residues For Compliance With Mrls CAC/GL 33-1999

2. Pengambilan contoh produk pertanian untuk pengujian kandungan residu pestisida sesuai *Recommended Methods Of Sampling For The Determination Of Pesticide Residues For Compliance With Mrls CAC/GL 33-1999*
3. Pengujian kandungan residu pestisida dari contoh produk pertanian yang dihasilkan oleh petani/Poktan/Gapoktan
4. Workshop pemaparan hasil pengujian kandungan residu pestisida pada produk pertanian di sentra produksi
5. Pelaporan.

Analisa Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

8.1.4 Fasilitas Penyiapan Harmonisasi Regulasi dan Standar Internasional

Output

Regulasi dan Standar Internasional

Outcome

Terlaksananya peningkatan Harmonisasi Regulasi dan Standar Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaku usaha menerapkan standar mutu yang harmonis dengan standar internasional tujuan ekspor

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Apresiasi dan sosialisasi regulasi teknis dan standar internasional Negara tujuan ekspor
- Pembinaan teknis harmonisasi dan ekivalensi sistem jaminan mutu dan standar yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan mutu dari Negara tujuan.

Analisa Resiko

- Lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan standard an regulasi teknis Negara tujuan ekspor.
- Kurangnya kemampuan teknis para Pembina mutu dalam memfasilitasi harmonisasi standard an regulasi teknis Negara tujuan ekspor untuk diterapkan oleh pelaku usaha.

8.1.5 Penyiapan Penghargaan Lingkup Direktorat Dalam Mendukung PPHP Awards

Output

Terlaksananya penyiapan bahan penghargaan PPHP awards

Indikator Kinerja Kegiatan

Terbangunnya komitmen pelaku usaha, stakeholder terkait dalam implementasi jaminan mutu dan keamanan pangan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 66.965.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- persiapan,
- pelaksanaan
- pembuatan laporan.

9. Pengawasan Jaminan Mutu (1788.013.001)

9.1.1 Operasionalisasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Output

Terlaksananya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan

Outcome

Indikator kinerja kegiatan

Tersampainya posisi dan kepentingan Indonesia berdasarkan usulan dan masukan dari instansi maupun *stake holder* terkait dengan PMKP.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp 331.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Operasionalisasi PMKP
- Penyusunan Permentan Sistem PMKP
- Operasionalisasi Sistem PMKP

Analisa Resiko

Terkait dengan **Peraturan Menteri Keuangan** yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

10. Layanan Perkantoran (1788.994.001)

10.1 Konsolidasi Direktorat Mendukung Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan SDM.

Output

Laporan Konsolidasi Direktorat mendukung kegiatan perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM

Outcome

Terlaksananya konsolidasi Direktorat mendukung kegiatan perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM

Indikator kinerja kegiatan

Kegiatan perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM dapat berjalan dengan baik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 501.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

10.2 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Direktorat.

Output

Sinkronisasi rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Mutu dan Standardisasi Tahun 2014

Outcome

Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi Direktorat Mutu dan Standardisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Progran dan Kegiatan Direktorat Mutu dan Standardisasi dapat berjalan dengan baik

Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 37.250.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

10.3 Pembahasan Laporan Kegiatan Direktorat.

Output

Laporan kegiatan Direktorat

Outcome

Terlaksananya Laporan kegiatan Direktorat

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya laporan kegiatan Direktorat yang dapat dijadikan salah satu referensi acuan dalam pengambilan keputusan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 26.500.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

10.4 Pembahasan Keragaman Direktorat.

Output

Laporan keragaan Direktorat

Outcome

Terlaksananya pembahasan keragaan Direktorat

Indikator kinerja kegiatan

Terciptanya keragaan Direktorat yang dapat dijadikan profil dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 124.500.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

10.5 Administrasi Pengadaan

Output

Pengadaan Barang dan Jasa 2014

Outcome

Administrasi Pengadaan dapat berjalan baik dan tertib pada Direktorat Mutu dan Standardisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya administrasi Pengadaan dengan baik dan benar pada Direktorat Mutu dan Standardisasi

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 82.050.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

10.6 Pengawasan dan Supervisi Pimpinan

Output

Laporan pengawasan dan supervisi pimpinan

Outcome

Terlaksananya pengawasan dan supervisi pimpinan

Indikator kinerja kegiatan

Dukungan manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.265.842.000,- dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

10.7 Fasilitasi Kegiatan Pendukung Direktorat

Output

Laporan fasilitasi kegiatan pendukung Direktorat

Outcome

Terlaksananya Laporan fasilitasi kegiatan pendukung Direktorat

Indikator kinerja kegiatan

Terfasilitasinya dukungan manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan

- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

B. PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK (1789)

1. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga (1789.002).

1.1 Kebijakan Perberasan Nasional

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Ekspor Produk Pertanian

Outcome

Terlaksananya Rapat Tim Pokja Perberasan

Indikator kinerja kegiatan

Terumuskannya prognosa perimbangan ketersediaan-kebutuhan beras sebagai dasar perlu tidaknya diberlakukan perpanjangan masa pelarangan impor

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 751.650.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Pelaksanaan
- Rapat Pokja Perberasan

Analisis Resiko

- Pelaksanaan kegiatan di Pusat, Banyaknya permintaan importasi kebutuhan beras jenis tertentu yang diinginkan perusahaan importir tidak dapat dipenuhi karena harus memperhatikan ketersediaan produksi di dalam negeri,
- Kebijakan dari pimpinan instansi

1.2 Kebijakan Pemasaran Domestik Produk Pertanian

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Out come

- o Terkontrolnya pelaksanaan impor-ekspor komoditas pertanian khususnya komoditas hortikultura dari mulai seleksi, penentuan waktu, lokasi dan jumlah impor, serta pelaksanaan importasi maupun eksportasinya.
- o Terfasilitasinya Rapat Koordinasi penetapan harga TBS

Indikator kinerja kegiatan

Terumuskannya persyaratan teknis pemberian impor – ekspor produk hortikultura dan adanya kesepakatan bersama terkait dengan harga TBS di seluruh Indonesia

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 956.200.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Tidak hadirnya pelaku usaha yang kompeten baik dari pemerintah maupun swasta pada saat rapat koordinasi terkait dengan kebijakan pemasaran produk hortikultura dan rapat koordinasi penetapan harga TBS.

1.3 Kebijakan Stabilisasi Harga

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Ekspor Produk Pertanian

Outcome

Terlaksananya pertemuan evaluasi kebijakan stabilisasi harga (bawang merah dan daging ayam)

Indikator kinerja kegiatan

Terkendalanya pelaksanaan intervensi pasar oleh Gapoktan dalam rangka stabilisasi harga di kabupaten sentra produksi bawang merah dan daging ayam.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 113.350.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

- Petani/Gapoktan perlu pembelajaran dan pendampingan serta masalah non teknis lainnya seperti perubahan mutasi pejabat didaerah sebagai pembina dan lambatnya pencairan dana tidak tepat waktu akan memperlambat pelaksanaan kegiatan.

2. Optimalisasi Sistem Pemasaran Produk Pertanian

2.1 Penyusunan Pedoman Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga Komoditi Pertanian

Output

Operasional kegiatan penunjang dalam rangka optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar

Outcome

Meningkatnya kinerja Direktorat Pengembangan Pemasaran Domestik sesuai dengan rancangan program yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 429.500.000, - dengan tahapan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

- Adanya perubahan jadwal sehingga dapat mengganggu perencanaan awal
- Perencanaan anggaran yang tidak tepat waktu

3. Pengembangan Akses Pemasaran

3.1 Pemetaan Wilayah Sumber Pasokan dan Sumber Permintaan

3.1.1 Penyusunan dan Pencetakan Pedoman Pasar Lelang.

Output

Peningkatan Nilai Tambah Saing, Industri Hilir, Pemasaran & Ekspor Hasil Pertani

Outcome

Tersusunnya Pedoman Umum Pasar Lelang sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pasar lelang

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersosialisasinya pasar lelang kepada para petani dan pelaku usaha serta instansi terkait dalam pengembangan pasar lelang.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola dengan anggaran sebesar Rp.57.900.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisa Resiko

Data atau Informasi yang diperoleh tidak lengkap

4. Fasilitas Pengembangan Jaringan Pemasaran Komoditas Pertanian

4.1 Fasilitas Pemasaran Komoditas Strategis

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran & Ekspor Hasil Pertani.

Outcome

Peningkatan promosi produk-produk pertanian strategis baik lokal, pasar domestik maupun pasar internasional.

Indikator Kinerja Kegiatan

Terbukanya akses pemasaran komoditas strategis;

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.287.100.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Peserta tidak memenuhi syarat/kualifikasi

4.2 Workshop Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing produk, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

Outcome

Terselenggaranya Workshop Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian.

Indikator Kinerja Kegiatan

- Teridentifikasinya permasalahan jaringan pemasaran secara horizontal dan vertikal;
- Terumuskannya pola distribusi dan tataniaga hasil pertanian yang efisien dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.248.600.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

- Peserta utusan dari instansi daerah yang tidak hadir karena banyaknya kegiatan lain yang harus dihadiri pada waktu yang bersamaan atau peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- Narasumber yang diundang berhalangan karena alasan tertentu atau ada keperluan lain.

4.3 Pertemuan Evaluasi Pengembangan Sistem Resi Gudang.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir & Ekspor Produk Pertanian

Outcome

Petani/Poktan/Gapoktan berminat dan berusaha memanfaatkan Sistem Resi Gudang.

Indikator Kinerja Kegiatan

Terinformasikannya pola Sistem resi gudang sebagai solusi bagi pelaku usaha atau pemilik barang (petani, pedagang, eksportir, importir, dan industri pengolahan) untuk mendapatkan pinjaman modal kerja

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.88.200.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisa Resiko

Jumlah dan kualifikasi peserta tidak memenuhi syarat.

4.4 Pengembangan Pemasaran Berbasis Kawasan Sentra

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir & Ekspor Produk Pertanian.

Outcome

Terlaksananya pertemuan koordinasi penguatan jaringan pemasaran berbasis kawasan sentra

Indikator Kinerja Kegiatan

Terjalinnnya jaringan pemasaran yang efisien bagi pelaku usaha di kawasan sentra

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola dengan anggaran sebesar Rp.501.200.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumpulan data
- Identifikasi peserta, lokasi dan calon narasumber
- Penyiapan bahan untuk kegiatan pertemuan
- Koordinasi dengan instansi terkait
- Penyelenggaraan pertemuan
- Pembuatan laporan kegiatan

Analisa Resiko

- Terlambatnya koordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan dikarenakan padatnya kegiatan yang hampir bersamaan
- Kebijakan dari pimpinan instansi.

5. Optimalisasi Pemasaran Beras Berlabel

5.1 Akselerasi Pemasaran Beras Berlabel Dengan Pasar Modern.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran & Ekspor Hasil Pertanian.

Outcome

Peningkatan kinerja operasional STA, Pasar Tani dan Pasar Temak.

Indikator Kinerja Kegiatan

Petani/gapoktan dapat mengelola langsung kelembagaan pasar tersebut dan terjalinnya kerjasama pemasaran antara sesama lembaga pemasaran dengan pelaku pemasaran (supplier, eksportir atau industri pengolahan).

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.108.300.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Peserta tidak memenuhi syarat/kualifikasi.

6. Akselerasi dan Sosialisasi Pengembangan Pasar Lelang.

6.1 Fasilitasi dan Evaluasi Pengembangan Pasar Lelang.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir & Ekspor Produk Pertanian

Outcome

- Terbentuknya harga produk ditingkat petani yang transparan
- Sistem pemasaran menjadi semakin efisien sehingga mampu meningkatkan posisi tawar petani

Indikator Kinerja Kegiatan

- Meningkatnya pendapatan petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani secara signifikan
- Meningkatnya minat petani untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp.178.200.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Data dan informasi tentang pasar lelang yang disampaikan oleh peserta tidak lengkap

7. Evaluasi Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran.

7.1 Evaluasi Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran & Ekspor Hasil Pertanian.

Outcome

Peningkatan kinerja operasional STA, Pasar Tani dan Pasar Ternak.

Indikator Kinerja Kegiatan.

Petani/gapoktan dapat mengelola langsung kelembagaan pasar tersebut dan terjalinnya kerjasama pemasaran antara sesama lembaga pemasaran dengan pelaku pemasaran (supplier, eksportir atau industri pengolahan).

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.427.500.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Peserta tidak memenuhi syarat/kualifikasi.

8. Laporan Kegiatan dan Pembinaan.

8.1 Penyusunan dan Penyebarluasan Pedoman Teknis PIP.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran & Ekspor Hasil Pertanian

Outcome

Tersusunnya buku pedoman teknis kegiatan tahun 2014

Indikator Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya pelayanan teknis secara professional dan terintegrasi

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko



Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dan tugas tambahan

8.2 Penyebarluasan Informasi Pasar Melalui Buletin dan Laporan Perkembangan Pemasaran

Output

Informasi pasar melalui perkembangan pemasaran

Outcome

Tersedianya Laporan Informasi Pasar Perkembangan Pemasaran

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya Laporan Informasi Perkembangan Pemasaran setiap bulan selama 12 bulan secara kontinyu

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 156.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumpulan data
- Penyusunan
- Pembuatan Laporan

Analisis Resiko

- Keterlambatan dalam penyusunan laporan.
- Keterlambatan dalam pengiriman data dari daerah.

8.3 Penyebarluasan Informasi Pasar Melalui Berbagai Media

Output

Informasi Pasar Komoditas Pertanian di Media Televisi, Radio, Media Cetak, Film Dokumenter, Papan elektronik dan Maintenance Sistem 9747

Outcome

Tersiarikannya informasi pasar komoditas pertanian di TVRI dan TV Swasta, Radio Swasta, media cetak, film documenter, papan elektronik dan system SMS 9747

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersebar nya informasi pasar melalui siaran TV (TVRI dan Swasta), Radio Swasta, media cetak, film documenter, papan elektronik dan system SMS 9747

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

8.4 Penyebarluasan Informasi Pasar Melalui Database Informasi Pasar

Output

Informasi pasar melalui database informasi pasar

Outcome

Tersedianya Informasi pasar melalui database informasi pasar

Indikator kinerja kegiatan

Tersusun nya laporan informasi pasar melalui database informasi pasar

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 42.900.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Data yang tersdia kurang lengkap untuk tersusunnya database

8.5 Penyebarluasan Informasi Pasar Melalui Booklet /Leaflet PIP.

Output

Booklet/Leaflet PIP

Outcome

Tersedianya booklet/leaflet PIP

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya 4 booklet/leaflet PIP

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 44.400.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

- Keterlambatan dalam penyusunan booklet/leaflet PIP
- Keterlambatan atau kesalahan dalam proses pencetakan

9. Pengembangan Analisis Pasar Hasil Pertanian

9.1 Fasilitasi Workshop Analisis Pemasaran.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran & Ekspor Hasil Pertanian.

Outcome

Peningkatan promosi produk-produk pertanian strategis baik lokal, pasar domestik maupun pasar internasional.

Indikator Kinerja Kegiatan

Terbukanya akses pemasaran komoditas strategis ;

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.302.600.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

Peserta tidak memenuhi syarat/kualifikasi

9.2 Fasilitasi Workshop Teknis Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP Tk - Terampil dan Ahli).

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Outcome

Terselenggaranya Workshop Teknis Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP Tk, Trampil dan Ahli).

Indikator Kinerja Kegiatan

- Teridentifikasinya permasalahan jaringan pemasaran secara horizontal dan vertikal;
- Terumuskannya pola distribusi dan tataniaga hasil pertanian hulu sampai hilir yang efisien dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.338.261.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

- Peserta utusan dari instansi daerah yang tidak hadir karena banyaknya kegiatan lain yang harus dihadiri pada waktu yang bersamaan atau peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diinginkan
- Narasumber yang diundang berhalangan karena alasan tertentu atau ada keperluan lain.

9.3 Analisis Biaya Usaha Tani dan Biaya Pemasaran.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Outcome

Terselenggaranya Analisis biaya usaha tani dan biaya pemasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan

- Teridentifikasinya permasalahan jaringan pemasaran secara horizontal dan vertikal;
- Terumuskannya pola distribusi dan tataniaga hasil pertanian hulu sampai hilir yang efisien dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.121.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

- Peserta utusan dari instansi daerah yang tidak hadir karena banyaknya kegiatan lain yang harus dihadiri pada waktu yang bersamaan atau peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- Narasumber yang diundang berhalangan karena alasan tertentu atau ada keperluan lain.

9.4 Analisis Pemasaran Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Output

Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

Outcome

Terselenggaranya Analisis pemasaran komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Indikator Kinerja Kegiatan

- Teridentifikasinya permasalahan jaringan pemasaran secara horizontal dan vertikal;
- Terumuskannya pola distribusi dan tataniaga hasil pertanian hulu sampai hilir yang efisien dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui belanja jasa profesi, dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

- o Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang perihal persediaan kas, sehingga setiap kegiatan harus direncanakan dengan baik.

10. Pengembangan Sistem Informatika Pelayanan Informasi Pasar.

10.1 Pengembangan Sistem PIP.

Output

Layanan informasi pengembangan system PIP

Outcome

Tersedianya layanan informasi pengembangan system PIP komoditas pertanian

Indikator Kinerja Kegiatan

Terbentuknya system PIP komoditas pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak ketiga dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan bahan survey
- Penyusunan petunjuk teknis PIP
- Pengolahan data pengembangan PIP
- Penyusunan aplikasi pengembangan PIP
- Pengembangan system PIP
- Pertemuan fasilitasi pengiriman data

Analisis Resiko

- Ketersediaan data yang tidak on time dan kontinyu
- Data yang tidak akurat
- Kesalahan dalam pengisian format system PIP.

10.2 Pengembangan Sistem Input Data PIP

Output

Sistem input data PIP

Outcome

Tersedinya system input data PIP secara kontinyu

Indikator Kinerja Kegiatan

Terbentuknya system input data PIP

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak ketiga dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan bahan survey
- Pengembangan system input data PIP

Analisis Resiko

- Ketersediaan data yang tidak *on time* dan kontinyu
- Data yang tidak akurat

10.3 Fasilitasi Pengolahan Data dan Analisis Pemasaran

Output

Terlaksananya Pengolahan data dan Analisis Pemasaran

Outcome

Terselenggaranya fasilitasi pengolahan data dan Analisis Pemasaran

Indikator kinerja kegiatan

Terselenggaranya Workshop Analisis Pemasaran yang dihadiri oleh calon pejabat fungsional analisis pasar

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 212.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi
- Pelaksanaan

Analisis Resiko

- Peserta utusan dari instansi daerah yang tidak hadir karena banyaknya kegiatan lain yang harus dihadiri pada waktu yang bersamaan atau peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- Narasumber yang diundang berhalangan karena alasan tertentu atau ada keperluan lain.

11. Evaluasi Pengembangan Informasi Pasar.

11.1 Evaluasi Manfaat PIP Bagi Petani.

Output

Evaluasi manfaat PIP

Outcome

Terevaluasinya manfaat PIP bagi petani

Indikator Kinerja Kegiatan

Terevaluasinya manfaat PIP bagi petani dalam mendapatkan informasi terkait dengan harga komoditas pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 33.550.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan Pelaksanaan
- Pelaksanaan
- Laporan

Analisis Resiko

- Jadwal pelaksanaan yang sering berubah.

11.2 Apresiasi Pembina dan Petugas PIP Berprestasi.

Output

Apresiasi bagi pembina dan petugas PIP berprestasi.

Outcome

Meningkatnya kinerja Pembina dan petugas PIP terkait dengan penyampaian informasi harga komoditas pertanian.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersampainya penghargaan kepada pembina dan petugas PIP berprestasi dan meningkatnya peran serta pembina dan petugas dalam memberikan informasi terkait dengan harga komoditas pertanian.



Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan anggaran sebesar Rp 286.300.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan Pelaksanaan
- Pelaksanaan
- Laporan

Analisis Resiko

- Jadwal pelaksanaan yang sering berubah.

12. Kegiatan Pendukung Pengembangan Informasi Pasar.

12.1 Pembinaan dan Pengawasan.

Output

Layanan pembinaan dan pengawasan kegiatan PIP

Outcome

Kegiatan pembinaan dan pengawasan PIP dapat berjalan dengan baik

Indikator Kinerja Kegiatan

Pembinaan dan pengawasan pengembangan informasi pasar di daerah dapat dipantau dengan mendatangi dan berkomunikasi langsung dengan daerah tersebut

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 270.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan PIP
- Perjalanan dinas dalam rangka apresiasi pembina dan petugas PIP

Analisis Resiko

- Ketersediaan uang persediaan yang tidak tepat waktu

13. Sarana dan Kelembagaan Pasar.

13.1 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tani, Pasar Ternak, STA dan Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan.

Output

- o Rumusan atau kebijakan peran kelompok tani/peternak dalam mewujudkan pasar yang ideal dan berkeadilan

Outcome

- Berlakunya kebijakan/peraturan peran kelompok tani/peternak di pasar ternak

Indikator Kinerja Kegiatan

- Berkurangnya beban/biaya yang ditanggung kelompok tani/peternak di pasar ternak
- Mengurangi margin yang diperoleh tengkulak, pedagang perantara dan menambah harga yang diterima oleh kelompok tani/peternak.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 337.600.000,- dengan tahapan sebagai berikut

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

- Adanya perubahan jadwal sehingga dapat mengganggu perencanaan awal.
- Perencanaan anggaran yang tidak tepat waktu.

13.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Hasil Pertanian.

Output

Fasilitasi pemasaran pada beberapa komoditas pertanian

Outcome

Meningkatnya kinerja Direktorat Pengembangan Pemasaran Domestik sesuai dengan rancangan program yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Terfasilitasinya pelaksanaan pemasaran pada beberapa komoditas pertanian khususnya komoditi yang tingkat fluktuatifnya tinggi

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 813.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pembuatan laporan.

Analisis Resiko

- Adanya perubahan jadwal sehingga dapat mengganggu perencanaan awal
- Perencanaan anggaran yang tidak tepat waktu

13.3 Evaluasi Kegiatan Pasar Tani, Pasar Ternak, STA dan Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan

Output

- o Rumusan atau kebijakan peran kelompok tani/peternak dalam mewujudkan pasar yang ideal dan berkeadilan

Outcome

- Berlakunya kebijakan/peraturan peran kelompok tani/peternak di pasar ternak

Indikator Kinerja Kegiatan

- Berkurangnya beban/biaya yang ditanggung kelompok tani/peternak di pasar ternak
- Mengurangi margin yang diperoleh tengkulak, pedagang perantara dan menambah harga yang diterima oleh kelompok tani/peternak.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 1.074.580.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan

Analisis Resiko

- Adanya perubahan jadwal sehingga dapat mengganggu perencanaan awal.
- Perencanaan anggaran yang tidak tepat waktu.

13.4 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Hasil Pertanian.

Output

Fasilitasi pemasaran pada beberapa komoditas pertanian

Outcome

Meningkatnya kinerja Direktorat Pengembangan Pemasaran Domestik sesuai dengan rancangan program yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Terfasilitasinya pelaksanaan pemasaran pada beberapa komoditas pertanian khususnya komoditi yang tingkat fluktuatifnya tinggi

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pembuatan laporan.

Analisis Resiko

- Adanya perubahan jadwal sehingga dapat mengganggu perencanaan awal
- Perencanaan anggaran yang tidak tepat waktu

14. Layanan Perkantoran (1789.994)

14.1. Koordinasi Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik.

Output

Koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2014.

Outcome

Terlaksananya koordinasi Direktorat Pemasaran Domestik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Program dan Kegiatan Direktorat Pemasaran Domestik dapat berjalan dengan baik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 68.500.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

14.2 Sinkronisasi dan Optimalisasi Pemasaran Domestik.

Output

Sinkronisasi dan optimalisasi rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemasaran Domestik Tahun 2014.

Outcome

Terlaksananya sinkronisasi dan optimalisasi Direktorat Pemasaran Domestik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan

Progran dan Kegiatan Direktorat Pemasaran Domestik dapat berjalan dengan baik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 281.600.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadual pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadual pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

14.3 Pembinaan Kompetensi SDM Direktorat Pemasaran Domestik.

Output

Pembinaan Mental dan Kerohanian SDM lingkup Direktorat Pemasaran Domestik

Outcome

Terlaksananya Peningkatan SDM pada Direktorat Pemasaran Domestik yang mempunyai pengetahuan dan wawasan

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya pembinaan mental dan kerohanian SDM lingkup Direktorat Pemasaran Domestik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadual pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadual pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

14.4 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2008.

Output

Audit internal Manajemen Mutu dan Perberkasan ISO 9001;2008

Outcome

Terauditnya manajemen mutu ISO 9001;2008 pada Direktorat Pemasaran Domestik

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya Audit internal Manajemen Mutu dan Perberkasan ISO 9001;2008 pada Direktorat Pemasaran Domestik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 54.889.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

14.5 Konsolidasi Direktorat Mendukung Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan SDM.

Output

Kegiatan Direktorat Pemasaran Domestik berjalan baik

Hasil

Terlaksananya konsolidasi dan Kegiatan Direktorat Pemasaran Domestik berjalan baik

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya kegiatan konsolidasi kegiatan perencanaan, evaluasi, keuangan dan SDM penunjang dengan baik dan benar pada Direktorat Pemasaran Domestik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 501.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan kegiatan dan adanya perubahan atau revisi kegiatan dan anggaran.

14.6 Pengawasan dan Supervisi

Output

Kegiatan pengawasan dan supervisi Direktorat Pemasaran Domestik berjalan baik

Outcome

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan supervisi pimpinan Direktorat Pemasaran Domestik berjalan baik

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan supervisi pimpinan dengan baik dan benar pada Direktorat Pemasaran Domestik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.353.100.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan dan supervisi yang akan merubah jadwal pelaksanaan kegiatan dan adanya perubahan atau revisi kegiatan dan anggaran.

C. PENGEMBANGAN PEMASARAN INTERNASIONAL (1790)

Analisa Data dan Informasi untuk Penyusunan Posisi Indonesia dalam Forum Perundingan Bilateral, Regional, dan Multilateral serta Forum Komoditi Strategis

1.1 Kerjasama Komoditi Regional dan Multilateral (1790.001.011)

1.1.1 Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Kerjasama Komoditi Bilateral Indonesia –Malaysia

Output

Kebijakan perdagangan Indonesia - Malaysia

Outcome

Disetujuinya kebijakan bersama terkait perdagangan Indonesia – Malaysia

Indikator Kinerja Kegiatan

Hasil analisis teknis tentang berbagai hal yang menjadi materi pada forum kerjasama bilateral Indonesia – Malaysia

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 115.500.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi
2. Korespondensi dengan instansi terkait
3. Pelaksanaan SWG, SOM, dan JME
4. Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Sulitnya memperoleh kesepakatan semua pihak terutama dalam menentukan posisi Indonesia dalam berbagai isu yang diperdebatkan antara Indonesia – Malaysia.

1.1.2 Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Kerjasama Komoditi Regional

Output

Pelaksanaan sidang-sidang kerjasama perdagangan produk pertanian dalam forum komoditi regional ASEAN

Outcome

Dimanfaatkannya laporan dari kegiatan Kerjasama Komoditi regional ASEAN

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya posisi DELRI untuk sidang komoditi teh, kopi, dan lada serta bahan seminar untuk kopi

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 123.800.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan

3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko

Kurangnya koordinasi dengan Kemnetrian lainnya dalam menentukan prioritas sektor yang akan diperjuangkan dalam perundingan di forum-forum perdagangan regional.

1.1.3 Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Kerjasama Komoditi Multilateral

Output

Laporan posisi DELRI dalam forum kerjasama komoditi multilateral CoA, TPR,CG, G-33, UNCTAD, APEC, GSTP dan D-8

Outcome

Dijadikannya hasil penyusunan dalam pelaksanaan kegiatan CoA, TPR,CG, G-33, UNCTAD, APEC, GSTP dan D-8

Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya kesiapan posisi runding sector pertanian Indonesia serta partisipasi aktif dalam forum perundingan multilateral.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp.111.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kurangnya koordinasi dengan Kementerian lainnya dalam menentukan prioritas sektor yang akan diperjuangkan dalam perundingan di forum-forum perdagangan multilateral.

1.2 Kerjasama Pemasaran Regional (1790.001.012)

1.2.1 Strategi dan Penyiasatan Posisi DELRI ASEAN FTA dan ASEAN - Mitra Dialog

Output

Tersedianya laporan persiapan penyusunan posisi DELRI pada tingkatan ASEAN FTA dan ASEAN - Mitra Dialog

Outcome

Terlaksanannya kegiatan perdagangan dalam ASEAN FTA dan ASEAN - Mitra Dialog

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya posisi runding indonesia dalam forum ASEAN FTA , sebagai masukan dalam menghadapi negosiasi bidang pertanian di forum dimaksud.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 351.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Sulitnya memperoleh kesepakatan semua pihak terutama dalam menentukan posisi indonesia dalam berbagai isu yang diperdebatkan dalam forum asean FTA. Untuk meminimalkan resiko ini, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan

mengadakan analisa bersama secara akurat dibawah bimbingan narasumber yang kompeten dalam bidangnya.

1.2.2 Konsolidasi Posisi Indonesia Dalam Forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Output

Terusumuskannya posisi sektor pertanian dalam menghadapi forum RCEP

Outcome

Terlaksanannya kegiatan konsolidasi posisi Indonesia dalam forum RCEP

Terwujudnya kesiapan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi forum RCEP

Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksanannya kegiatan konsolidasi posisi Indonesia dalam forum RCEP.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan pejabat lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/ Lembaga Teknis terkait dengan RCEP. Anggaran sebesar Rp. 184.100.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kemungkinan resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah tidak hadirnya narasumber dan peserta yang sesuai dalam menangani masalah RCEP ini, sehingga informasi yang diperoleh

dan rumusan hasil dari pertemuan ini kurang komprehensif. Salah satu cara untuk meminimalkan risiko ini adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan para sumber informasi dan lembaga terkait.

1.2.3 Konsolidasi dan Koordinasi Sektor Pertanian Menghadapi AEC 2015

Output

Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi sektor pertanian menghadapi AEC 2015

Outcome

Terwujudnya kesiapan sektor pertanian Indonesia menghadapi AEC 2015

Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi sektor pertanian menghadapi AEC 2015

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 150.200.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Risiko :

Kemungkinan risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya penjadwalan pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan waktu para pembicara dan pembahas yang akan diundang dalam acara dimaksud sehingga informasi dan rumusan

hasil yang diperoleh kurang komprehensif. Salah satu cara untuk meminimalkan resiko ini adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif seawal mungkin melalui Kementerian/Lembaga terkait agar dapat ditunjuk pengganti yang sederajat.

1.3 Kerjasama Pemasaran Multilateral (1790.001.013)

1.3.1 Strategi dan Penyiasatan Posisi Indonesia Dalam Forum Kerjasama Pemasaran Multilateral

Output

Tersusunnya rumusan strategi dan penyiasatan posisi pertanian Indonesia dalam forum kerjasama pemasaran multilateral

Outcome

Dimanfaatkannya informasi bagi para stakeholder dan pengambil kebijakan dalam pengembangan kerjasama multilateral

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya bahan dan materi sebagai masukan dalam menghadapi negosiasi bidang pertanian di forum multilateral

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 310.450.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :



Kemungkinan resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah belum optimalnya updating informasi yang terkait dengan isu dan posisi pertanian Indonesia dalam perundingan kerjasama multilateral. Salah satu cara untuk meminimalkan resiko ini adalah dengan mengadakan rapat-rapat yang intensif dengan Kementerian/Lembaga lain dalam menentukan posisi Indonesia dan komunikasi yang intensif dengan perwakilan tetap RI di Jenewa dan instansi teknis lainnya.

1.3.2 Capacity Building Untuk Pemahaman Aturan-aturan WTO

Output

Memahami aturan-aturan Perdagangan Internasional Dalam Forum Regional dan Multilateral

Outcome

Pemahaman staf pemasaran internasional agar dapat memahami aturan-aturan perdagangan dalam forum bilateral, regional dan multilateral khususnya produk pertanian sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas.

Indikator Kinerja Kegiatan

Memahami aturan-aturan perdagangan internasional khususnya produk pertanian kepada seluruh sumberdaya manusia pada Direktorat Pemasaran Internasional.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 172.780.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Direktorat Pemasaran Internasional belum memiliki sumber daya manusia yang memahami tentang aturan-aturan perdagangan bilateral, multilateral dan regional karena sebagian besar back ground pendidikannya adalah ilmu pertanian sedangkan analisa saat ini lebih banyak analisa ekonomi.

1.4 Kerjasama Pemasaran Bilateral (1790.001.014)

1.4.1 Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Negosiasi Bilateral

Output

Laporan persiapan penyusunan posisi DELRI dalam forum negosiasi bilateral

Outcome

Terlaksanannya kegiatan penyusunan posisi DELRI dalam forum negosiasi bilateral

Indikator Kinerja Kegiatan

Tercapainya kepentingan perdagangan produk pertanian Indonesia di pasar dunia melalui forum perdagangan dunia, baik kepentingan ofensif (pembukaan pasar dan penurunan subsidi) maupun kepentingan defensif (perlindungan terhadap industri pertanian di dalam negeri).

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 710.910.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kurangnya koordinasi dengan Kementerian lainnya dalam menentukan prioritas sector yang akan diperjuangkan dalam perundingan di forum-forum perdagangan multilateral.

1.5 Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/ UNCTAD (1790.001.015)

1.5.1 Penyusunan Posisi DELRI Dalam Forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/ UNCTAD

Output

Laporan persiapan penyusunan posisi DELRI dalam forum kerjasama perdagangan IGG-FAO/UNCTAD

Outcome

Terlaksanannya kegiatan penyusunan posisi DELRI dalam forum kerjasama perdagangan IGG-FAO/UNCTAD

Indikator Kinerja Kegiatan

Tercapainya kepentingan perdagangan produk pertanian Indonesia di pasar dunia melalui forum perdagangan dunia, baik kepentingan ofensif (pembukaan pasar dan penurunan subsidi) maupun kepentingan defensif (perlindungan terhadap industri pertanian di dalam negeri).

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 131.500.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kurangnya koordinasi dengan Kementerian lainnya dalam menentukan prioritas sektor yang akan diperjuangkan dalam perundingan di forum-forum perdagangan multilateral.

**1.6 Pengembangan Pasar Ekspor Melalui Market Intelligence
(1790.001.017)**

1.6.1 Kajian Market Intelligence

Output

Laporan Kajian Dinamika Perubahan Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Produk Pertanian Ekspor

Outcome

Terlaksanannya penyusunan Kajian Dinamika Perubahan Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Produk Pertanian Ekspor

Indikator Kinerja Kegiatan

Tercapainya perubahan yang dinamis terhadap daya saing komparatif dan kompetitif produk pertanian yang di ekspor

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara seleksi sederhana dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Seminar

Analisa Resiko :

Kurangnya waktu tenaga ahli yang mempunyai kapabilitas dan dukungan data base yang tidak mencukupi.

1.6.2 Sosialisasi Hasil Kajian Market Intelligence

Output

Laporan Training Market Intelligence

Outcome

Termanfaatkannya pelatihan market intelligence untuk dapat mempercepat gerak para stakeholder dalam menggali dan menangkap peluang ekspor

Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pelatihan market intelligence

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 199.713.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kurangnya waktu tenaga ahli yang mempunyai kapabilitas dan dukungan data base yang tidak mencukupi.

1.7 Advokasi Minyak Sawit Berkelanjutan (1790.001.018)

1.7.1 Workshop Advokasi Minyak Sawit Berkelanjutan di Dalam Negeri

Output

Laporan hasil workshop advokasi minyak sawit berkelanjutan di dalam negeri

Outcome

Termanfaatkannya laporan hasil workshop advokasi minyak sawit berkelanjutan di dalam negeri

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya laporan hasil workshop advokasi minyak sawit berkelanjutan di dalam negeri

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 198.600.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Keterlambatan pengadaan lelang dan perubahan jadwal pimpinan.

**2.1 Kerjasama Komoditi Bilateral, Regional dan Multilateral
(1790.002.001)**

1.2.1 Pertemuan Komoditi Bilateral Indonesia – Malaysia

Output

Pelaksanaan sidang-sidang kerjasama perdagangan

Outcome

Tersusunnya usulan-usulan kegiatan untuk peningkatan daya saing komoditi dan penurunan hambatan perdagangan

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya laporan sidang-sidang kerjasama perdagangan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 572.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Keterlambatnya mendapatkan tanggal pelaksanaan karena ketidakpastian dari ke-2 negara akibat ketidaksesuaian tanggal yang diusulkan dengan ketersediaan waktu yang ada sehingga dapat mengakibatkan kegiatan terhambat.

1.2.2 Joint Task Force Regular Meeting

Output

Laporan hasil pertemuan Joint Task Force Regular Meeting di Indonesia

Outcome

Dimanfaatkannya laporan ini sebagai kesepakatan tingkat Menteri untuk menangani permasalahan hambatan perdagangan sawit.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya laporan pertemuan Joint Task Force Regular Meeting

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 123.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan

2. Koordinasi/Korespondensi
3. Pelaksanaan
4. Pembuatan laporan

Analisa Resiko :

- Perubahan jadwal secara tiba-tiba
- Keterlambatan pemberitahuan pihak Malaysia dalam penentuan tanggal dan waktu pelaksanaan

**1.2.3 Pertemuan Teknis Kerjasama Komoditi Regional
Output**

Laporan pertemuan teknis kerjasama komoditi regional

Outcome

Dimanfaatkannya laporan pertemuan teknis kerjasama komoditi regional

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya bahan dan materi teknis sebagai masukan dalam menghadapi negosiasi bidang pertanian dalam kerjasama komoditi regional

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 585.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Pembuatan laporan

Analisa Resiko :



Kurangnya koordinasi dengan Ditjen teknis lainnya dalam menentukan prioritas sector yang akan diperjuangkan dalam perundingan kerjasama komoditi regional.

1.2.4 Strategi Peningkatan Daya Saing Teh Indonesia

Output

Laporan strategi peningkatan daya saing teh Indonesia

Outcome

Dimanfaatkannya laporan strategi peningkatan daya saing teh Indonesia

Indikator Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya kegiatan strategi peningkatan daya saing teh Indonesia

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Pembuatan laporan

Analisa Resiko :

Terlambatnya pelaksanaan *workshop on the benefit of the tea to the human health* dikarenakan adanya perubahan jadwal kehadiran pimpinan dan peserta workshop tidak banyak yang hadir.

1.2.5 Partisipasi pada Pertemuan Kerjasama Komoditi Multilateral

Output

Laporan pertemuan kerjasama komoditi multilateral

Outcome

Dimanfaatkannya laporan partisipasi kerjasama komoditi multilateral

Indikator Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya *strategi peningkatan daya saing teh Indonesia*

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 472.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Pembuatan laporan

Analisa Resiko :

Terlambatnya pelaksanaan workshop tindak lanjut kerjasama komoditi multilateral dikarenakan adanya perubahan jadwal kehadiran pimpinan.

1.2.6 Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait

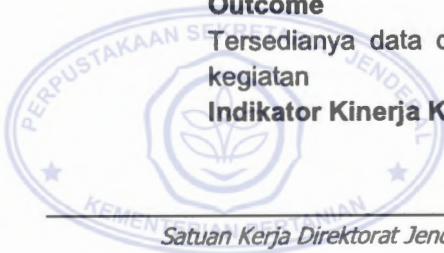
Output

Tersedianya laporan hasil koordinasi dengan instansi terkait baik dengan instansi di daerah maupun pusat

Outcome

Tersedianya data dan informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan



Tersusunnya data dukung dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 103.900.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Analisa permasalahan dan persiapan
2. Perjalanan dinas dalam bentuk koordinasi ke daerah sentra komoditi atau instansi terkait lainnya
3. Pembuatan laporan

Analisa Resiko :

Apabila kurang intensif dalam melakukan komunikasi pihak-pihak yang akan ditemui sering tidak berada di tempat sehingga informasi yang didapat masih kurang optimal khususnya untuk koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi komoditi.

2.2 Kerjasama Pemasaran Regional (1790.002.002)

2.2.1 Partisipasi Dalam Forum Negosiasi ASEAN FTA dan ASEAN Mitra Dialog

Output

Hasil pertemuan forum negosiasi ASEAN FTA dan ASEAN Mitra Dialog

Outcome

Tersusunnya hasil pertemuan forum negosiasi ASEAN FTA dan ASEAN Mitra Dialog

Indikator Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya pelaksanaan pertemuan forum negosiasi ASEAN FTA dan ASEAN Mitra Dialog

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 387.500.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kemungkinan resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya penjadwalan pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan waktu para pembicara dan pembahas yang akan diundang.

2.3 Kerjasama Pemasaran Multilateral (1790.002.003)

2.3.1 Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Multilateral

Output

Hasil pertemuan dalam forum kerjasama multilateral

Outcome

Tersusunnya hasil pertemuan pertemuan dalam forum kerjasama multilateral

Indikator Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya pelaksanaan pertemuan dalam forum kerjasama multilateral

Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 460.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kemungkinan resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya penjadwalan pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan waktu para pembicara dan pembahas yang akan diundang.

2.4 Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/UNCTAD (1790.002.004)

2.4.1 Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/UNCTAD (1790.002.004)

Output

Laporan partisipasi dalam forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/UNCTAD

Outcome

Terlaksanannya partisipasi Indonesia dalam forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/UNCTAD

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya posisi runding indonesia dalam forum Kerjasama Perdagangan IGG-FAO/UNCTAD, sebagai masukan dalam menghadapi negosiasi bidang pertanian di forum dimaksud.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2.5 Akselerasi Ekspor Hortikultura ke Singapura (1790.002.005)

2.5.1 Akselerasi Ekspor Hortikultura ke Singapura (1790.002.005)

Output

Buku dan laporan hasil akselerasi ekspor produk hortikultura ke Singapura

Outcome

Terlaksanannya akselerasi ekspor hortikultura ke Singapura

Indikator Kinerja Kegiatan

Terjadinya kerjasama Indonesia – Singapura dalam akselerasi ekspor hortikultura ke Singapura antara lain kegiatan pemetaan dan struktur ongkos distribusi pemasaran produk hasil hortikultura orientasi ekspor, pertemuan penguatan jaringan rantai pasok produk hortikultura untuk tujuan ekspor Singapura, serta pemantapan task force peningkatan ekspor hortikultura ke Singapura.

Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 599.610.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3.1 Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan Internasional (1790.003.001)

3.1.1 Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan Internasional

Output

Data dan informasi perdagangan internasional.

Outcome

Tersedianya data dan informasi statistik ekspor impor pertanian.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersedianya informasi bagi stakeholder dan pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan kerjasama internasional.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 492.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Persiapan
- 2. Pelaksanaan
- 3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3.2 Analisis Peluang Pasar Produk Pertanian (1790.003.002)

Analisis Peluang Pasar Produk Pertanian

Output

Tersedianya laporan keragaan ekspor-impor berdasarkan subsektor, komoditi, negara tujuan, negara asal

Tersedianya data base ekspor impor dalam bentuk pivot table yang uptodate sebagai bahan untuk melakukan analisa pasar produk pertanian.

Outcome

Dimanfaatkannya laporan sebagai bahan masukan bagi kerjasama bilateral, trilateral, multilateral dan kerjasama komoditi dan stake holders lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya laporan analisa peluang pasar produk pertanian sebagai bahan masukan bagi kerjasama bilateral, trilateral, multilateral dan kerjasama komoditi dan stakeholder lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 141.600.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan pengumpulan data
2. Pengolahan data
3. Penyusunan keragaan (trend dan market share (pangsa pasar)/ analisa peluang pasar produk pertanian

Analisa Resiko :



Bahan yang dikumpulkan tidak sesuai harapan/kebutuhan atau tidak valid dan tidak tepat waktu

3.3. Evaluasi Kebijakan Ekspor Impor Komoditi Pertanian (1790.003.003)

3.3.1 Evaluasi Kebijakan Ekspor Impor Komoditi Pertanian

Output

Laporan evaluasi kebijakan ekspor impor komoditi pertanian.

Outcome

Tersusunnya laporan evaluasi kebijakan ekspor impor komoditi pertanian.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersedianya informasi bagi stakeholder dan pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan kerjasama internasional.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 140.500.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3.4 Harmonisasi Tarif Produk Pertanian (1790.003.004)

3.4.1 Harmonisasi Tarif Produk Pertanian

Output

Laporan harmonisasi tarif produk pertanian.

Outcome

Tersusunnya laporan harmonisasi tarif produk pertanian.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersedianya informasi bagi stakeholder dan pengambil kebijakan terhadap harmonisasi tarif produk pertanian.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 122.100.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

**4.5 Fasilitas Pengembangan Ekspor Produk Pertanian
(1790.003.005)**

4.5.1 Fasilitas Pengembangan Ekspor Produk Pertanian

Output

Laporan penyusunan fasilitas ekspor produk pertanian.

Outcome

Tersusunnya fasilitas ekspor produk pertanian

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersedianya ekspor produk pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 230.550.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan

3.6. Monitoring Implementasi Kesepakatan Pemasaran Bilateral (1790.003.006)

3.6.1 Monitoring Implementasi Kesepakatan Pemasaran Bilateral

Output

Laporan monitoring implementasi Kesepakatan Pemasaran Bilateral

Outcome

Terlaksananya monitoring implementasi Kesepakatan Pemasaran Bilateral

Indikator Kinerja Kegiatan

Terwujudnya ekspor dalam rangka implementasi Kesepakatan Pemasaran Bilateral

Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 412.400.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kehadiran dan kesediaan nara sumber tidak sesuai dengan jadwal yang telah diberikan

3.7 Verifikasi Teknis Ekspor Produk Pertanian (1790.003.007)

3.7.1 Verifikasi Teknis Ekspor Produk Pertanian

Output

Laporan verifikasi teknis ekspor produk pertanian

Outcome

Terlaksananya verifikasi teknis ekspor produk pertanian

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunya bahan pertemuan koordinasi dan sosialisasi dalam rangka verifikasi teknis ekspor produk pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 153.800.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :



- 1. Kehadiran dan kesediaan nara sumber tidak sesuai dengan
- 2. jadwal yang telah diberikan.

3.8 Advokasi Pemasaran Ekspor Produk Pertanian (1790.003.009)

3.8.1 Advokasi Pemasaran Ekspor Produk Pertanian Dalam Rangka Optimalisasi Kerjasama dan Akses Pasar Bilateral

Output

Laporan advokasi pemasaran ekspor produk pertanian dalam rangka optimalisasi kerjasama dan akses pasar bilateral

Outcome

Terlaksananya advokasi pemasaran ekspor produk pertanian dalam rangka optimalisasi kerjasama dan akses pasar bilateral

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunya bahan advokasi pemasaran ekspor produk pertanian dalam rangka optimalisasi kerjasama dan akses pasar bilateral

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 213.850.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan

Analisa Resiko :

Kehadiran dan kesediaan nara sumber tidak sesuai dengan jadwal yang telah diberikan.



3.9 Pembinaan dan Pengawasan Akselerasi Peningkatan Ekspor Pola Insentif Komoditi Pertanian (1790.003.010)

Output

Laporan pembinaan dan pengawasan akselerasi peningkatan ekspor pola insentif komoditi pertanian

Outcome

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan akselerasi peningkatan ekspor pola insentif komoditi pertanian

Indikator Kinerja Kegiatan

Tercapainya ekspor hortikultura meningkat di atas 10%

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan swakelola dengan anggaran sebesar Rp 406.920.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. **Persiapan**

Pada tahap ini akan dilakukan rapat persiapan dan pengumpulan bahan

b. **Pelaksanaan**

- Penyusunan bahan evaluasi kegiatan pola insentif 2 in 1 untuk akselerasi ekspor
- Workshop peningkatan ekspor komoditi pertanian pola insentif
- Penyusunan pedoman teknis akselerasi peningkatan ekspor pola insentif komoditi pertanian
- Workshop evaluasi kegiatan pola insentif 2 in 1 untuk akselerasi ekspor

c. **Tahap pembuatan laporan**

Analisa Resiko :

Perencanaan kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan



4.0 Layanan Perkantoran (1790.994)

4.1 Administrasi Kegiatan (1790.994.001)

4.1.1 Sinkronisasi Dan Koordinasi Kegiatan Direktorat

Output

Laporan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan

Outcome

Meningkatnya kinerja Direktorat Pemasaran Internasional sesuai dengan rancangan program yang telah ditentukan

Indikator Kinerja kegiatan

Terselenggaranya kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penanganan kegiatan direktorat pemasaran internasional dengan tersusunnya buku laporan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan direktorat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 152.600.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

kurangnya koordinasi dengan Sub Direktorat terkait dalam menentukan prioritas pelayanan yang harus dilaksanakan dan kemungkinan lemahnya kinerja dari SDM yang ada.

4.1.2 Evaluasi Kegiatan Direktorat

Output

Laporan evaluasi kegiatan Direktorat

Outcome

Terlaksananya laporan evaluasi kegiatan Direktorat

Indikator Kinerja kegiatan

Terevaluasinya kinerja Direktorat selama kurun waktu setahun

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 163.200.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Kurangnya koordinasi dengan Sub Direktorat terkait dalam menentukan prioritas pelayanan yang harus dilaksanakan dan kemungkinan lemahnya kinerja dari SDM yang ada.

4.1.3 Sosialisasi Hasil-Hasil Sidang Internasional

Output

Laporan Hasil Sidang Internasional

Outcome

Tersusunnya laporan hasil sidang internasional

Indikator Kinerja kegiatan

Tersedianya laporan hasil sidang internasional sebagai bagian dari rantai kegiatan utama direktorat pemasaran internasional

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 114.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat.

4.1.4 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001;2008

Output

Laporan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001;2008 dan Resertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001;2008

Outcome

Tersusunnya Resertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001;2008

Indikator Kinerja kegiatan

Diterapkannya Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001;2008 pada Direktorat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- penyediaan bahan

- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan layanan perkantoran terhambat

4.1.5 Pengawasan dan Supervisi Pimpinan

Output

Tersedianya laporan perjalanan pengawasan supervisi pimpinan

Outcome

Terlaksananya semua kegiatan lingkup Direktorat Pemasaran Internasional. Kegiatan ini merupakan supervisi yang dilakukan Direktur atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka mengawal berbagai kegiatan yang terkait dengan tupoksi agar kegiatan yang dimaksud mencapai sasaran sesuai dengan visi dan misi

Indikator Kinerja kegiatan

Tersusunnya laporan perjalanan pengawasan supervisi pimpinan dari daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.172.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisis Resiko

Kurangnya koordinasi dengan subdit terkait dalam menentukan prioritas pelayanan yang harus dilaksanakan dan kemungkinan lemahnya kinerja dari SDM yang ada.

4.1.6 Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan SDM

Output

Tersedianya laporan perjalanan

Outcome

Terlaksananya semua kegiatan lingkup Direktorat Pemasaran Internasional.

Indikator Kinerja kegiatan

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 501.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisis Resiko

Kurangnya koordinasi dengan subdit terkait dalam menentukan prioritas pelayanan yang harus dilaksanakan dan kemungkinan lemahnya kinerja dari SDM yang ada.



D. PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI (1791)

1. Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahawan (1791.001.001)

1.1 Pemantapan Pengembangan Usaha dan Kemitraan Melalui Pola Insentif (1791.001.001)

1.1.1 Stakeholder Meeting Pengembangan Usaha dan Kemitraan

Output

Laporan pertemuan pengembangan usaha dan kemitraan

Outcome

Terlaksananya pertemuan para pelaku usaha di bidang pengembangan usaha dan kemitraan

Indikator Kinerja kegiatan

Pelaksanaan pertemuan pengembangan usaha dan kemitraan dapat dirasakan pada masukan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Kegiatan yang akan dilaksanakan perlu adanya perencanaan yang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan pengembangan usaha dan kemitraan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1.1.2 Penguatan Capacity Building Pilot Program KAPEMBA

Output

Laporan penguatan capacity building pilot program Kawasan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis (KAPEMBA)

Outcome

Terlaksananya penguatan capacity building pilot program Kawasan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis (KAPEMBA)

Indikator Kinerja kegiatan

penguatan capacity building pilot program Kawasan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis (KAPEMBA)

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Persiapan
- Identifikasi, koordinasi, dan Pemantapan capacity building
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisis Resiko

Sulit dalam mendapatkan dukungan dari pihak/sektor lain karena tidak merasa memiliki dari sektor-sektor diluar pertanian sehingga pembangunan sektor pertanianse olah-olah adalah tanggungjawab institusi pertanian

1.2 Pembinaan Kemitraan, Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (1791.001.002)

1.2.1 Bimbingan Teknis Kemitraan, Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

Output

Laporan bimbingan teknis kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif

Indikator Kinerja kegiatan

Pelaksanaan bimbingan teknis kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif dapat dirasakan pada sinergi kegiatan pada daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 694.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

1.2.2 Temu Usaha Kemitraan dan Kewirausahaan

Output

Laporan temu usaha kemitraan dan kewirausahaan

Outcome

Terbentuknya kerjasama antara gapoktan/pelaku usaha mitra dengan perusahaan mitra

Indikator Kinerja kegiatan

Terfasilitasi kemitraan dan kewirausahaan antara petani/poktan/gapoktan, asosiasi lingkup pertanian/koperasi agribisnis, pelaku usaha, petugas Dinas Pertanian/Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pertanian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

- Tidak terjadinya kesepakatan kemitraan antara petani, pelaku usaha dan perusahaan besar
- Kurangnya dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait terhadap pengembangan kemitraan dan kewirausahaan

1.2.3 Workshop Pengembangan Agrowisata Nasional.

Output

Laporan workshop pengembangan agrowisata nasional

Outcome

Terjadinya kesepahaman dan komitmen dari masing-masing pihak terkait dalam rangka pengembangan agrowisata secara nasional dan wilayah.

Indikator Kinerja kegiatan

Terbentuknya kemitraan dan kewirausahaan antara petani/poktan/gapoktan, asosiasi lingkup pertanian/koperasi agribisnis, pelaku usaha, petugas Dinas Pertanian/ Kabupaten/ Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pertanian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan harapan, hal ini menyebabkan kurang terinformasikannya pengembangan agrowisata kepada pelaku usaha/petani/gapoktan.

1.2.4 Pengembangan Inkubator Agribisnis

Output

Terlaksananya pengembangan inkubator agribisnis

Outcome

Meningkatnya kapasitas dalam menerapkan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis

Meningkatkan kapasitas dalam mengakses & memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan lain-lain

Indikator Kinerja kegiatan

Pengembangan wirausaha poktan/gapoktan di bidang agribisnis

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 313.500.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- koordinasi dengan instansi terkait
- pelaksanaan
- pelaporan

Analisis Resiko

Kurangnya respon dari stakeholders dalam pengembangan inkubator yang mandiri hal ini akan menyebabkan tidak berkembangnya kewisausahaan ankubator.

1.2.5 Evaluasi dan Pembinaan Kemitraan Usaha

Output

Laporan evaluasi dan pembinaan kemitraan usaha

Outcome

Terlaksananya evaluasi dan pembinaan kemitraan usaha

Indikator Kinerja kegiatan

Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan kemitraan usaha merupakan pekerjaan yang terus menerus dalam mengawal program dan kegiatan kemitraan usaha

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 207.300.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsinyasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Laporan secara berkala tidak dalam dilakukan sehingga pemantauan dan evaluasi tidak berjalan dengan baik.

1.2.6 Koordinasi Teknis Kemitraan dan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif

Output

Laporan koordinasi teknis kemitraan dan kewirausahaan ekonomi kreatif

Outcome

Terlatihnya para pelaku usaha tentang konsep dan pola kemitraan dan kewirausahaan perencanaan usaha ekonomi kreatif

Indikator Kinerja kegiatan

Petani/poktan/gapoktan, asosiasi lingkup pertanian/koperasi agribisnis, pelaku usaha, petugas Dinas Pertanian/Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pertanian dapat mengembangkan pengetahuannya dalam pengembangan pola kemitraan dan kewirausahaan ekonomi kreatif.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 112.500.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

- Tidak terjadinya kesepakatan kemitraan antara petani, pelaku usaha dan perusahaan besar
- Kurangnya dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait terhadap pengembangan kemitraan dan kewirausahaan
- Materi yang diberikan tidak dapat diaplikasikan di lapangan
- Peserta yang hadir tidak sesuai harapan
- Narasumber berhalangan hadir

1.3 Pengembangan Unit Layanan Informasi dan Promosi Rempah dan Jamu Indonesia (1791.001.003)

1.3.1 Pengembangan Layanan Informasi Rempah dan Jamu

Output

Laporan pengembangan layanan informasi rempah dan jamu

Outcome

Tersedianya sarana informasi dan pengembangan layanan informasi rempah dan jamu pada unit layanan informasi dan promosi rempah dan jamu Indonesia (*spices and jamu center*)

Indikator Kinerja kegiatan

Tersebarluasnya informasi terkait rempah dan jamu kepada masyarakat melalui *spices and jamu center*.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- identifikasi kebutuhan pengembangan unit layanan informasi rempah dan jamu
- peliputan media massa dan peliputan dalam bentuk *off air* dan *on air* dan *game anareality show*

- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Stakeholder di bidang rempah dan jamu kurang partisipatif

2. Pelayanan Pengembangan Investasi Sektor Pertanian

2.1. Pelayanan Pengembangan Investasi Sektor Pertanian (1791.002.001)

2.1.1 Workshop Pengembangan Investasi Pertanian

Output

Laporan pertemuan pengembangan investasi pertanian

Outcome

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai stakeholder baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pengembangan investasi pertanian di setiap wilayah

Indikator Kinerja kegiatan

Terjalinannya kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dari masing-masing pihak terkait dalam rangka pengembangan investasi pertanian secara nasional dan wilayah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 155.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan kegiatan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

- Peserta yang hadir tidak sesuai dengan harapan
- Nara sumber berhalangan hadir

2.1.2 Pembahasan dan Penggandaan Bahan Promosi Investasi Pertanian.

Output

Buku Promosi Investasi Pertanian

Outcome

Tersusunnya dan tercetaknya Promosi Investasi Pertanian

Indikator Kinerja kegiatan

Tersedianya media cetak profil Promosi Investasi Pertanian yang tersebar di Indonesia

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pemilihan dan penetapan naskah
- penyusunan draft awal media, diskusi dan tukar informasi
- pencetakan media
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Media agrowisata yang terbit tidak sesuai jadwal

2.1.3 Gelar Potensi dan Peluang Investasi Pertanian

Output

Laporan kegiatan gelar potensi dan peluang investasi pertanian

Outcome

Terlaksananya kegiatan gelar potensi dan peluang investasi pertanian

Indikator Kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama antara pelaku usaha, stake holder dengan masyarakat umum dalam pertemuan kegiatan gelar potensi dan peluang investasi pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan, sewa stand, disign dan konstruksi pameran
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan yang kurang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan gelar potensi dan peluang investasi pertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.1.4 Agricultural Investment Forum

Output

Laporan Agricultural Investment Forum

Outcome

Tersampaiannya penyebarluasan potensi dan peluang investasi serta berbagai kebijakan/regulasi investasi pertanian pada pelaku usaha, stakeholder serta masyarakat

Indikator Kinerja kegiatan



Meningkatnya daya tarik/minat calon investor/dunia usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya/investasi di Indonesia

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 685.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Identifikasi dan pengumpulan data
- Annual Investment Meeting Dubai
- Agricultural Investment Forum Korea, China dan Australia
- Penyusunan laporan

Analisis Resiko

Jika terjadi kerusakan dan ketidakhadiran peserta dapat menimbulkan kegagalan kegiatan Agricultural Investment Forum

2.1.5 Promosi Investasi Dalam Negeri

Output

Laporan promosi dalam negeri

Outcome

Tersebarluasnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi pertanian di dalam negeri

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya daya tarik/minat calon investor/dunia usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya/investasi di Indonesia

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 455.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- identifikasi dan pengumpulan data
- pelaksanaan fasilitasi promosi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Jika terjadi kerusakan dan ketidakhadiran peserta dapat menimbulkan kegagalan kegiatan promosi dalam negeri

2.1.6 Asistensi Proses Investasi Pertanian

Output

Terfasilitasinya calon investor dalam proses berinvestasi di sektor pertanian

Outcome

Adanya investasi dari dalam dan luar negeri, pelaku usaha agribisnis yang akan melakukan investasi di sektor pertanian.

Indikator kinerja kegiatan

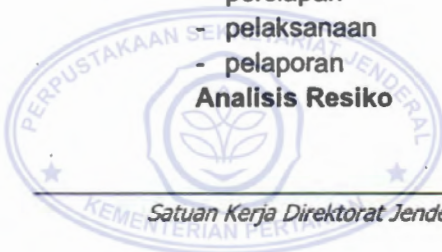
Terfasilitasinya calon investor dalam proses berinvestasi di Indonesia

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- pelaporan

Analisis Resiko



Tidak tersedianya data dan informasi terkait lokasi investasi, rencana proyek investasi, bahan baku, kebijakan, regulasi dan perizinan pelaksanaan investasi pertanian yang akurat dan terkini.

2.1.7 Pembahasan dan Pencetakan Pedoman/Standar Investasi Sektor Pertanian

Output

Buku pedoman/prosedur investasi sektor pertanian

Outcome

Tersebarluasnya informasi mengenai prosedur dan persyaratan investasi sektor pertanian

Indikator Kinerja kegiatan

Meningkatnya minat dunia usaha untuk menanamkan modalnya/investasi di sektor pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- identifikasi dan pengumpulan data
- pembahasan dan penyusunan
- pencetakan
- pelaporan

Analisis Resiko

Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi, regulasi/kebijakan investasi sektor pertanian yang akurat dan terkini sehingga dapat mengagalkan kegiatan tersebut

2.1.8 Pembahasan dan Pencetakan Buku Peluang Investasi Pertanian di Indonesia (Agriculture Investment Opportunity in Indonesia)

Output

Buku peluang investasi pertanian di Indonesia (Agriculture Investment Opportunity in Indonesia) yang berisi informasi/data mengenai potensi dan peluang berinvestasi sektor pertanian diberbagai wilayah/daerah di Indonesia dan bahasa Inggris

Outcome

Tersebarluasnya informasi data potensi dan peluang investasi dan berbagai regulasi/kebijakan, prosedur dan insentif investasi sektor pertanian

Indikator Kinerja kegiatan

Meningkatnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- identifikasi dan pengumpulan data
- pembahasan dan penyusunan
- pencetakan
- pelaporan

Analisis Resiko

Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang nvestasi, regulasi/kebijakan investasi sektor pertanian yang akurat dan terkini sehingga dapat mengagalkan kegiatan tersebut

2.1.9 Koordinasi Pengembangan Investasi Pertanian

Output

Laporan koordinasi pengembangan investasi pertanian

Outcome

Terciptanya iklim investasi di sektor pertanian yang kondusif

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya investasi sektor pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- identifikasi dan pengumpulan data
- pelaksanaan FGD Divestasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Narasumber yang kompeten dibidang Divestasi Hortikultura dan data serta informasi tentang Divestasi Hortikultura tidak tersedia

2.1.10 Penyusunan Profil Investasi Usaha Agribisnis Beberapa Komoditi Pertanian Investasi

Output

Profil investasi usaha agribisnis pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan



Outcome

Tersusunnya buku profil pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Indikator Kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama stakeholder usaha agribisnis dalam upaya pengembangan usaha pertanian investasi

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan, pengumpulan data
- penyusunan profil
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan profil investasi usaha agribisnis tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

**3. Pameran, Promosi, Eksibisi dan Perlombaan Dalam Negeri
Maupun Luar Negeri**

3.1 Promosi Luar Negeri (1791.003.001)

**3.1.1 Pameran Internasional di Berbagai Negara (Jerman, Amerika,
Paris, Jepang, Korea Selatan dan Filipina)**

A. Fasilitas Promosi Luar Negeri

Output

Terpromosikannya ragam dan potensi produk unggulan pertanian Indonesia di beberapa negara

Outcome

Terjalinnya komunikasi bisnis dan kerjasama antara pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha mancanegara/pengunjung pameran

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya permintaan akan produk pertanian Indonesia di mancanegara

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.821.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pra pelaksanaan
- pelaksanaan
- pasca pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Recruitment peserta pameran yang berasal dari pelaku usaha dan atau petani produsen produk pertanian Indonesia tidak sesuai dengan harapan/kebutuhan, bahan pameran dari komoditas tertentu yang bersifat mudah rusak serta tidak adanya tindak lanjut hasil pameran.

3.1.2 Pembuatan Film Promosi Produk Ekspor Pertanian

Output

Film promosi produk ekspor pertanian

Outcome

Terinformasikannya komoditas unggulan dan produk ekspor pertanian Indonesia kepada masyarakat, pelaku usaha dan



pengguna di dalam dan luar negeri melalui film promosi produk ekspor pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Film promosi produk ekspor pertanian menjadi salah satu referensi dalam pengembangan produk ekspor komoditi pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 205.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pra pelaksanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Pengambilan gambar/shooting produk pertanian terganggu karena cuaca yang kurang mendukung, kualitas produk yang akan dishoting dan kurang profesionalnya dalam pengambilan gambar.

3.1.3 Pengembangan Indikasi Geografis

A. Workshop Nasional Indikasi Geografis

Output

Laporan workshop nasional indikasi geografis

Outcome

Terlaksananya workshop nasional indikasi geografis

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya hubungan kerjasama antara stakeholders (petani/gapoktan/pengusaha produk pertanian, Kementerian

Pertanian, EO, Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi dan dinas-dinas lingkup pertanian di daerah serta Pemda)

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 188.800.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan workshop nasional indikasi geografis
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop nasional indikasi geografis tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pelatihan Pengembangan IG bagi TIM Teknis dan Petugas Dinas Terkait

Output

Laporan pengembangan IG bagi Tim teknis dan petugas dinas terkait

Outcome

Menambah pengetahuan tentang indikasi geografis kepada para petani/kelompok tani selaku produsen produk serta para pedagang pengumpul dan eksportir produk pertanian dan juga masyarakat wilayah setempat secara keseluruhan serta aparat pembina dinas daerah

Indikator kinerja kegiatan

Terselenggaranya kegiatan pelatihan pengembangan IG bagi Tim teknis dan petugas dinas terkait

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 162.200.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan pengawalan dan pembinaan IG
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Kurangnya keinginan poktan/produsen/pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan Indikasi Geografis bagi Tim teknis dan petugas dinas.

C. Bimbingan dan Pengawalan Pengembangan Indikasi Geografis

Output

Laporan bimbingan dan pengawalan pengembangan indikasi geografis

Outcome

Mengetahui perkembangan lebih awal indikasi geografis kepada para petani/kelompok tani selaku produsen produk serta para pedagang pengumpul dan eksportir produk pertanian dan juga masyarakat wilayah setempat secara keseluruhan.

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya kegiatan bimbingan dan pengawalan pengembangan indikasi geografis

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 561.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan kegiatan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Kurangnya keinginan poktan/produsen/pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan bimbingan dan pengawalan pengembangan indikasi geografis.

3.14. Penyusunan dan Pencetakan Direktori Produsen dan Eksportir Produk Pertanian

Output

Bahan/materi direktori produsen dan eksportir produk pertanian

Outcome

Tersedianya bahan/materi direktori produsen dan eksportir produk pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya direktori produsen dan eksportir produk pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 154.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- konsignasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan Indonesia penyusunan dan pencetakan direktori produsen dan

eksportir produk pertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.1.5 Pembahasan dan Pencetakan Buku Indonesia Agricultural Products

Output

Buku Indonesai Agricultural products

Outcome

Terlaksananya pencetakan Indonesai Agricultural products

Indikator kinerja kegiatan

Termanfaatkannya buku Indonesai Agricultural products sebagai informasi kepada masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 138.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan pembahasan dan pencetakan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembahsan dan pencetakan buku Indonesai Agricultural products tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan

3.1.6 Bimbingan Teknis Pengembangan Ekspor Produk Pertanian

Output

Laporan bimbingan teknis pengembangan ekspor produk pertanian

Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis pengembangan ekspor produk pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta bimbingan untuk melaksanakan pengembangan usaha ekspor produk-produk pertanian dalam negeri.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan kegiatan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Tidak tersedianya dana pendamping dari provinsi-provinsi yang diundang

3.1.7 Pembahasan dan Pembuatan Bahan Promosi Luar Negeri

Output

Bahan promosi luar negeri berupa katalog, banner, backdrop, leaflet, pin, souvenir, goodybag dan lain-lain.

Outcome

Terinformasikannya komoditas unggulan pertanian Indonesia kepada masyarakat, pelaku usaha dan pengguna di dalam dan luar negeri melalui bahan promosi seperti katalog, banner, backdrop, leaflet, pin, souvenir, goodybag dan lain-lain.

Indikator kinerja kegiatan

Dikenalnya ragam komoditas unggulan produk pertanian Indonesia di manca negara serta adanya minat pelaku usahanya untuk menjajaki lebih lanjut

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 222.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pembuatan design katalog, banner, backdrop, leafleat, pin, souvenir, goodybag dan lain-lain.
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Bahan utama yang diperlukan untuk pembuatan bahan promosi tidak tersedia atau tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

3.1.8 Persiapan Pameran World Expo Milano 2015

Output

Bahan dan materi pameran world expo milano 2015

Outcome

Tersedianya bahan dan materi pameran world expo milano 2015

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya pameran world expo milano 2015 antara pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 253.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan konsignasi
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan konsignasi penyusunan bahan dan materi Tea Tour for International Traders and Industries tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.1.9 Tea Tour for International Traders and Industries

Output

Laporan Tea Tour for International Traders and Industries

Outcome

Tersedianya Tea Tour for International Traders and Industries

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya Tea Tour for International Traders and Industries antara pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 356.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan Tea Tour for International Traders and Industries
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan Tea Tour for International Traders and Industries tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.1.10 Food and Hotel Asia in Singapore

Output

Laporan food and hotel asia in Singapore

Outcome

Terlaksananya food and hotel asia in Singapore

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya food and hotel asia in Singapore antara pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat di Singapura.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 260.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- penyediaan bahan
- pelaksanaan kegiatan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan food and hotel asia in Singapore tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



3.2 Promosi Dalam Negeri (1791.003.002)

3.2.1 Fasilitas Promosi dan Pameran

Output

Laporan fasilitas promosi dan pameran

Outcome

Terlaksananya fasilitas promosi dan pameran

Indikator kinerja kegiatan

Adanya keikutsertaan stakeholder dalam pelaksanaan promosi dan pameran produk-produk pertanian Indonesia yang diselenggarakan di dalam negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan untuk promosi dan pameran kegiatan akan dilelangkan; dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.472.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan fasilitas pameran dan promosi telah dirancang setahun sebelumnya, sehingga kalau ada perubahan waktu dan tempat karena kebijakan pimpinan, bisa jadi peserta akan mengalihkan keikutsertaannya pada kegiatan diluar Kementan.

3.2.2 Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri

Output

Promosi Dalam Negeri



Outcome

Terlaksananya Promosi Dalam Negeri

Indikator kinerja kegiatan

Adanya keikutsertaan stakeholder dalam pelaksanaan promosi dan pameran produk-produk pertanian Indonesia yang diselenggarakan di dalam negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 514.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Terlalu dekatnya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga peserta kesulitan untuk pameran dan promosi karena keterbatasan keuangan

3.2.3 Bimbingan Teknis Peningkatan Promosi

Output

Laporan bimbingan teknis peningkatan promosi

Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan promosi

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta bimbingan untuk melaksanakan pameran, promosi, eksbisi dan perlombaan produk-produk pertanian dalam negeri



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 202.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan peningkatan promosi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.2.4 Penyusunan dan Pencetakan Buku Promosi

Output

Buku Promosi

Outcome

Tersedianya Buku Promosi

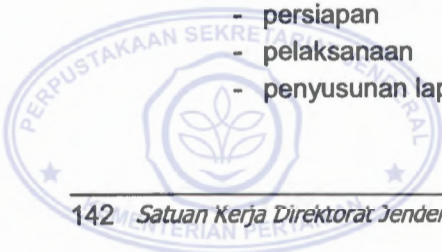
Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta bimbingan untuk melaksanakan pameran, promosi, eksbisi dan perlombaan produk-produk pertanian dalam negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 180.150.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Kurangnya data tentang usaha skala kecil produk pertanian yang dapat dijadikan bahan pencetakan buku database.

3.2.5 Publikasi Promosi Dalam Negeri

Output

Laporan publikasi promosi dalam negeri

Outcome

Terlaksananya publikasi promosi dalam negeri

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta bimbingan untuk melaksanakan pameran, promosi, eksbisi dan perlombaan produk-produk pertanian dalam negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 198.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan publikasi promosi dalam negeri tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



3.2.6 Bahan Promosi Dalam Negeri

Output

Bahan promosi dalam negeri

Outcome

Tersedianya Bahan promosi dalam negeri

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya kegiatan promosi dalam negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 196.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga penyiapan promosi dalam negeri tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.2.8 Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat

Output

Penayangan iklan layanan masyarakat terkait pencitraan terhadap produk-produk unggulan pertanian nasional, baik segar maupun olahannya.

Outcome

Terbangunnya citra positif dari masyarakat terhadap produk-produk unggulan pertanian nasional

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk pertanian nasional, baik produk segar maupun olahannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 435.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Data dan informasi produk pertanian yang dikumpulkan kurang akurat sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal.

3.2.9 Fasilitasi Perbaikan Kemasan

Output

Terlaksananya fasilitasi perbaikan kemasan

Outcome

Terlatihnya para pelaku usaha di bidang pertanian dalam mendesain produk, kemasan dan merk sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mendesain suatu produk dan kemasan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah daya saing dan citra produk pertanian Indonesia yang tinggi terhadap suatu produk

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 308.000.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Para peserta pelatihan tidak termotivasi untuk memahami materi yang diberikan, hal tersebut dikarenakan antara lain :

Materi yang diberukan kurang fokus ke sasaran

Narasumber kurang memberikan tanggapan yang memuaskan atas pertanyaan peserta

Kurang tepatnya pemilihan peserta

Kurang koordinasi antara panitia dengan instansi terkait

3.2.10 Koordinasi Teknis Promosi Dalam Negeri

Output

Laporan kordinasi teknis promosi dalam negeri

Outcome

Terlaksananya kordinasi teknis promosi dalam negeri

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya koordinasi promosi dalam negeri

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- fasilitasi pengembangan rempah dan jamu
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan kordinasi promosi dalam negeri tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.1 Layanan Perkantoran (1791.994)

4.1.1 Penyusunan dan Pencetakan Pedoman Teknis Kegiatan PUI

Output

Pedoman teknis kegiatan Direktorat PUI

Outcome

Terlaksananya penyusunan pedoman teknis kegiatan Direktorat PUI

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PUI

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan pedoman teknis kegiatan Direktorat PUI tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



4.1.2 Koordinasi Teknis Kegiatan PUI Pusat dan Daerah

Output

Laporan kordinasi teknis kegiatan PUI pusat dan daerah

Outcome

Terlaksananya kordinasi teknis kegiatan PUI pusat dan daerah

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan Direktorat PUI dengan aparat di daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 207.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- fasilitasi pengembangan rempah dan jamu
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan kordinasi teknis kegiatan PUI pusat dan daerah tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.1.3 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Direktorat Tahun 2014

Output

Laporan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan Direktorat Tahun 2014

Outcome

Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan Direktorat Tahun 2014

Indikator kinerja kegiatan

Terkoordinasikannya kegiatan Direktorat PUI baik dari internal maupun eksternal

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan Direktorat Tahun 2013 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.1.4 Pembahasan Laporan Tahunan Direktorat Tahun 2013

Output

Laporan Tahunan Direktorat Tahun 2013

Outcome

Terlaksananya Laporan Tahunan Direktorat Tahun 2013

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat sehingga dapat menjadi acuan pengambil keputusan pimpinan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 38.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Tahun 2012 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.1.5 Pembahasan Rancangan Kegiatan Direktorat Tahun 2015

Output

Laporan rancangan kegiatan Direktorat Tahun 2015

Outcome

Terlaksananya penyusunan rancangan kegiatan Direktorat Tahun 2015 untuk pusat dan daerah

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya rancangan kegiatan Direktorat Tahun 2015 untuk pusat dan daerah yang menjadi acuan pelaksanaan tahun berikutnya

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 102.200.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan rancangan kegiatan Direktorat Tahun 2015 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.1.6 Kegiatan Penunjang Direktorat

Output

Laporan pelaksanaan kegiatan penunjang

Outcome

Terlaksananya kegiatan penunjang dalam rangka mendukung kegiatan Direktorat PUI

Indikator kinerja kegiatan

Program dan kegiatan Direktorat PUI dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ROPAK yang telah disusun

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.379.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- belanja bahan
- belanja honor
- belanja jasa lainnya
- perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan direktorat
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan penunjang tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



4.1.7 Koordinasi PUI

Output

Laporan koordinasi dengan instansi terkait

Outcome

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama dengan koordinasi dengan instansi terkait

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 162.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Adanya komunikasi yang tidak berjalan sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, pimpinan instansi terkait yang mau didatangi tidak berada ditempat.

4.1.8 Pembinaan Corporate Culture

Output

Terlaksananya kegiatan pembinaan corporate culture

Outcome

Meningkatnya kapasitas serta terbitnya mental pegawai.

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya keterampilan, kompetensi, disiplin dan perilaku pegawai

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Komunikasi yang tidak berjalan sehingga perubahan perilaku pegawai tidak berjalan dengan baik.

4.1.9 Konsolidasi Direktorat Mendukung Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan SDM

Output

Laporan koordinasi dengan instansi terkait

Outcome

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama dengan koordinasi dengan instansi terkait

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 501.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Adanya komunikasi yang tidak berjalan sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, pimpinan instansi terkait yang mau didatangi tidak berada ditempat

E. PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (1792)

1. Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (1792.006.001)

1.1 Pengembangan Agroindustri Tanaman Pangan

A. Pembahasan Pedoman Teknis Tanaman Pangan

Output

Pedoman teknis pengolahan hasil tanaman pangan

Outcome

Terlaksananya penyusunan pedoman teknis pengolahan hasil tanaman pangan

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya pedoman teknis pengolahan hasil tanaman pangan sebagai acuan teknis bagi petugas/pelaksana/pelaku usaha dalam upaya mengembangkan agroindustri tanaman pangan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 49.650.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan

- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Ketersediaan data yang tidak akurat dapat menyebabkan pedoman teknis tidak dapat dipakai sebagai acuan.

B. Bimbingan Teknis Agroindustri Tanaman Pangan (Padi)

Output

Laporan bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan komoditi padi

Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan komoditi padi

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen poktan/gapoktan dan pelaku usaha pengolahan tanaman pangan khususnya tanaman padi dalam memproduksi hasil olahan yang berkualitas

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 757.800.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko



Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan khususnya tanaman padi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Bimbingan Teknis Agroindustri Tanaman Pangan (Jagung dan Kedelai)

Output

Laporan bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan komoditas jagung dan kedelai

Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan komoditas jagung dan kedelai

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen poktan/gapoktan dan pelaku usaha pengolahan tanaman pangan khususnya komoditas jagung dan kedelai dalam memproduksi hasil olahan yang berkualitas

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 240.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan khususnya

komoditas jagung dan kedelai tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

D. Bimbingan Teknis Agroindustri Tanaman Pangan (Tepung)

Output

Laporan bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan khususnya tepung

Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan khususnya tepung

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen poktan/gapoktan dan pelaku usaha pengolahan tanaman pangan khususnya tepung dalam memproduksi hasil olahan yang berkualitas

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 248.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis agroindustri tanaman pangan khususnya tepung tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

E. Pengawasan Pengembangan Agroindustri Tanaman Pangan

Output

Laporan pengawasan pengembangan agroindustri tanaman pangan

Outcome

Terlaksananya pengawasan pengembangan agroindustri tanaman pangan

Indikator kinerja kegiatan

Menumbuhkembangkan unit usaha pengolahan berbasis gapoktan yang efektif dan efisien serta memberdayakan gapoktan agar mampu menerapkan GMP secara optimal dan gapoktan dapat berperan tidak saja sebagai produsentetapi juga sebagai pemasok (supplier) bahan baku untuk industri atau pasar.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui jasa lainnya serta pengawasan dengan perjalanan dinas, dengan anggaran sebesar Rp. 237.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pengawasan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengawasan pengembangan agroindustri tanaman pangan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

1.1. Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Output

Direktori pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah diupdate

Outcome

Terlaksananya penyusunan direktori pengolahan hasil tanaman pangan

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya direktori pengolahan hasil tanaman pangan yang berisi tentang potensi pengembangan olahan komoditi tanaman pangan di suatu provinsi/wilayah/daerah dan kelembagaan serta UPH yang ada disuatu provinsi/wilayah atau daerah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 93.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan direktori pengolahan hasil tanaman pangan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

1.2 Pembahasan Pengembangan Agroindustri Tepung Komposit

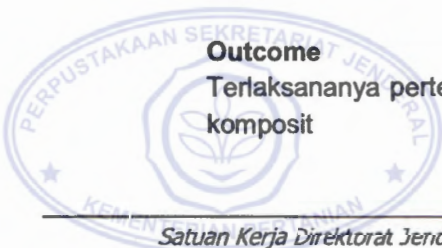
A. Pertemuan Koordinasi Antar Instansi

Output

Laporan pertemuan koordinasi antar instansi terkait tepung komposit

Outcome

Terlaksananya pertemuan koordinasi antar instansi terkait tepung komposit



Indikator kinerja kegiatan

Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait baik dipusat maupun di daerah terkait tepung komposit yang akan dijadikan rekomendasi pada tahap selanjutnya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 75.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan koordinasi antar instansi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pembahasan Pengembangan Agroindustri Tepung Komposit

Output

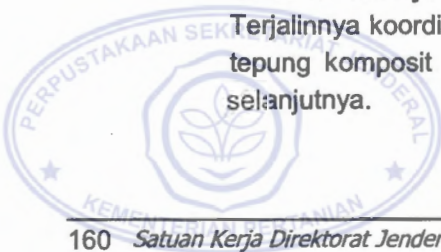
Laporan pembahasan pengembangan agroindustri tepung komposit

Outcome

Terlaksananya pembahasan pengembangan agroindustri tepung komposit

Indikator kinerja kegiatan

Terjalannya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait tepung komposit yang akan dijadikan rekomendasi pada tahap selanjutnya.



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 78.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembahasan pengembangan agroindustri tepung komposit tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Workshop Hasil Pembahasan Pengembangan Agroindustri Tepung Komposit

Output

Workshop hasil pembahasan pengembangan agroindustri tepung komposit

Outcome

Terlaksananya workshop hasil pembahasan pengembangan agroindustri tepung komposit

Indikator kinerja kegiatan

Terjalannya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder serta aparat instansi terkait tepung komposit yang akan dijadikan rekomendasi pada tahap selanjutnya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 69.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop hasil pembahasan pengembangan agroindustri tepung komposit tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

1.3 Pengawasan Pengembangan Pilot Program Agribisnis Perdesaan Output

Kajian Pengembangan Pilot Program Agribisnis Perdesaan

Outcome

Terlaksananya Kajian Pengembangan Pilot Program Agribisnis Perdesaan

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya hasil kajian pengembangan Pilot Program Agribisnis Perdesaan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode jasa konsultan, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Data dan materi yang disajikan tidak akurat dan validitas masih diragukan karena menggunakan data series yang tidak update.

2. Pengembangan Pengolahan Hortikultura (1792.006.002)

2.1 Pengawasan Pilot Program Agribisnis Perdesaan Berbasis Kelompok Output

Kajian pilot program agribisnis perdesaan berbasis kelompok.

Outcome

Terlaksananya pilot program agribisnis perdesaan berbasis kelompok pada komoditi mangis di kabupaten tapanuli selatan dan komoditi bawang merah di kabupaten kuningan.

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya 2 (dua) hasil kajian pilot program agribisnis perdesaan berbasis kelompok pada komoditi manggis dan bawang merah yang dapat digunakan sebagai bahan masukan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode jasa konsultan, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Alokasi waktu dan alokasi tempat yang tidak tepat sehingga dapat mengakibatkan pelaksanaan kajian ini tidak efektif.

2.2 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura Output

Laporan bimbingan teknis pengolahan hasil hortikultura

Outcome

Terlatihnya peserta bimbingan teknis pengolahan hasil hortikultura

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen poktan/gapoktan dan pelaku usaha pengolahan hortikultura dalam memproduksi hasil olahan yang berkaulitas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 386.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pelaksanaan bimtek
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan hasil hortikultura tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.3 Fasilitasi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Hortikultura

Output

Laporan fasilitasi pelaku usaha pengolahan hasil hortikultura

Outcome

Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha pengolahan hasil hortikultura

Indikator kinerja kegiatan

Terfasilitasinya teknologi dan sarana pengolahan hasil hortikultura serta terbentuknya kepengurusan asosiasi di daerah yang belum dikukuhkan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan melalui belanja lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha pengolahan hasil hortikultura tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.4 Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Hortikultura

Output

Data pengolah hasil hortikultura yang telah di update

Outcome

Terlaksananya pemutakhiran data pengolah hasil hortikultura

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya sebaran informasi pelaku usaha dan keragaman usaha dibidang pengolahan hasil hortikultura

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 52.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pemutakhiran data pengolah hasil hortikultura tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan

2.5 Pembinaan dan Pengawasan Agroindustri Hortikultura

Output

Laporan pembinaan dan pengawasan agroindustri hortikultura

Outcome

Tertaksannya pembinaan dan pengawasan agroindustri hortikultura

Indikator kinerja kegiatan

Terkawalnya pelaksanaan pilot program di 71 lokasi dana TP TA. 2014

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 324.000.000. dengan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan agroindustri hortikultura tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



3. Pengembangan Pengolahan Perkebunan (1792.006.003)

3.1 Pembahasan Pedoman, Bahan Kebijakan dan Standar Komoditi Perkebunan

Output

Pedoman kebijakan dan standar komoditi perkebunan

Outcome

Berkembangnya unit-unit pengolahan ditingkat gapoktan

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya produk dan mutu komoditi perkebunan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 364.900.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pembahasan pedoman, bahan kebijakan dan standar komoditi perkebunan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.2 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan Berbasis GMP

Laporan bimbingan teknis pengolahan hasil perkebunan berbasis GMP



Outcome

Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan hasil perkebunan berbasis GMP

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan pengolahan yang memenuhi standar pengolahn GMP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 474.950.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan hasil perkebunan berbasis GMP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.4 Fasilitas Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan

A. Fasilitas Pengembangan Tanaman Tahunan

Output

Laporan fasilitas pengembangan tanaman tahunan (kopi)

Outcome

Meningkatnya wawasan SDM dalam pengembangan pengolahan pengembangan tanaman tahunan (kopi)



Indikator kinerja kegiatan

Dihasilkannya beragam produk kopi lanjutan dan meningkatnya nilai tambah kopi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui belanja jasa lainnya dan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 189.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan fasilitasi pengembangan tanaman tahunan (kopi) tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Perkebunan

Output

Laporan fasilitasi pengembangan pengolahan perkebunan

Outcome

Dikenalnya produk olahan kopi petani Indonesia di berbagai negara.

Indikator kinerja kegiatan

Terjadinya kerjasama dengan negara lain dan meningkatnya nilai tambah produk olahan Indonesia

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000. dalam bentuk perjalanan dinas ke luar negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan fasilitasi pengembangan pengolahan perkebunan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.5 Pembinaan dan Pengawasan Agribisnis Tanaman Tahunan Output

Laporan pembinaan dan pengawasan agribisnis tanaman tahunan

Outcome

Meningkatnya jumlah UPH yang operasional.

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pemanfaatan unit pengolahan hasil perkebunan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 333.000.000. dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan agribisnis tanaman tahunan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.6 Pembinaan dan Pengawasan Agribisnis Tanaman Semusim

Output

Laporan pembinaan dan pengawasan agribisnis tanaman semusim

Outcome

Terbinanya UPH tanaman semusim baik secara teknis maupun manajemen

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya jumlah UPH yang operasional

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 126.000.000. dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawalan agribisnis tanaman semusim tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

**3.7 Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil Perkebunan
Output**

Terbinanya unit-unit pengolahan yang telah mendapat fasilitasi bangunan, alat dan mesin.

Outcome

Meningkatnya jumlah UPH yang operasional

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pemanfaatan unit pengolahan hasil perkebunan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui belanja jasa konsultan, profesi dan swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 303.850.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan optimalisasi unit pengolahan hasil perkebunan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.8 Pertemuan Koordinasi Teknis Pengolahan Bokar Bersih Output

Laporan pertemuan koordinasi pengolahan bokar bersih.

Outcome

Meningkatnya jumlah UPPB yang operasional.

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pemanfaatan unit pengolahan hasil perkebunan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 125.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan rakor
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan koordinasi pengolahan bokar bersih tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.9 Sosialisasi Pedoman Pengukuran Rendemen TBS

Output

Laporan sosialisasi pedoman pengukuran rendemen TBS.

Outcome

Diperolehnya data rendemen yang lebih akurat

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya harga rendemen yang lebih memihak kepada petani.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 89.850.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sosialisasi pedoman pengukuran rendemen TBS tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.10 Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Perkebunan

Output

Data pengolah hasil perkebunan yang telah di update

Outcome

Terlaksananya pemutakhiran data pengolah hasil perkebunan

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya sebaran informasi pelaku usaha dan keragaman usaha dibidang pengolahan hasil perkebunan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 71.450.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pemutakhiran data pengolah hasil perkebunan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan

3.11 Koordinasi Antar Instansi

Output

Laporan koordinasi antar instansi

Outcome

Terlaksananya koordinasi antar instansi

Indikator kinerja kegiatan

Terkoordinasi dan terkomunikasinya dengan baik antar instansi baik dalam maupun luar Kementerian Pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 31.500.000. dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan koordinasi antara instansi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



4. Pengembangan Pengolahan Peternakan (1792.006.004)

4.1 Temu Koordinasi Teknis Pengolahan Hasil Pertanian

Output

Laporan temu teknis pengolahan hasil pertanian

Outcome

Terlaksananya temu teknis pengolahan hasil pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinnnya koordinasi dengan baik antara aparat dengan pelaku usaha serta stakeholder pengolahan hasil pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 296.565.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan pedoman

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan temu teknis pengolahan hasil pertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.2 Pembahasan Rancangan Standar Pengolahan Susu

Output

Laporan rancangan standar pengolahan susu

Outcome

Terselenggaranya kegiatan rancangan standar pengolahan susu



Indikator kinerja kegiatan

Adanya standar yang dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengolahan susu oleh masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 102.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembasan rancangan standar pengolahan susu tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.3 Seminar Pengembangan Agroindustri Persusuan di Perguruan Tinggi

Output

Laporan seminar pengembangan agro industri persusuan di perguruan tinggi

Outcome

Tersebarluasnya informasi mengenai manfaat susu dan meningkatnya pengetahuan tentang industri pengolahan susu

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya konsumsi susu masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan seminar pengembangan agroindustri persusuan di perguruan tinggi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.4 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Peternakan

Output

Laporan bimbingan teknis penanganan limbah peternakan

Outcome

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis para pelaku usaha dan aparat pembina dibidang teknologi penanganan limbah peternakan

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pendapatan pelaku usaha pengolahan limbah peternakan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 679.585.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan bimbingan teknis penanganan limbah peternakan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.5 Pembahasan Data Base Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Output

Data Base Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Outcome

Terlaksananya pembahasan data base pelaku usaha pengolahan hasil peternakan

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 197.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Data series yang digunakan kurang lengkap sehingga data base pelaku usaha pengolahan hasil peternakan tidak dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengambilan keputusan.



4.6 Fasilitas Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan

Output

Laporan fasilitasi pengembangan pengolahan hasil peternakan

Outcome

Dikenalnya produk olahan peternakan petani Indonesia di berbagai negara.

Indikator kinerja kegiatan

Terjadinya kerjasama dengan negara lain dan meningkatnya nilai tambah produk olahan Indonesia

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000. dalam bentuk perjalanan dinas ke luar negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan fasilitasi pengembangan hasil peternakan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.7 Pengawasan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan

Output

Laporan pengawasan pengembangan pengolahan hasil peternakan

Outcome

Terlaksananya pengawasan pengembangan pengolahan hasil peternakan

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya hasil olahan peternakan yang mempunyai daya saing

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 110.500.000. dalam bentuk perjalanan dinas ke dalam negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengawalan pengembangan pengolahan hasil peternakan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.8 Koordinasi Antar Instansi

Output

Laporan koordinasi antar instansi

Outcome

Terlaksananya koordinasi antar instansi

Indikator kinerja kegiatan

Terkoordinasi dan terkomunikasinya dengan baik antar instansi baik dalam maupun luar Kementerian Pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 110.500.000. dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan koordinasi antara instansi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



4.9 Pembahasan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Peternakan Output

Pedoman teknis pengolahan hasil peternakan

Outcome

Berkembangnya unit-unit pengolahan ditingkat gapoktan

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya produk dan mutu komoditi peternakan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 72.350.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pembahasan pedoman teknis pengolahan hasil peternakan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5. Dukungan Manajemen (1792.994.001)

5.1 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Direktorat Output

Sinkronisasi rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pemasaran

Outcome

Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi Direktorat Pengolahan Hasil Pemasaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan



Indikator kinerja kegiatan

Program dan Kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pemasaran dapat berjalan dengan baik

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 240.100.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadual pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadual pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

5.2 Penyusunan Rancangan Kegiatan Direktorat Tahun 2015

Output

Rancangan kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2015

Outcome

Tersusunnya rancangan kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2015

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyusunan rancangan kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp.84.500.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain serta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

5.3 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Output

Surveilans ISO 9001:2008

Outcome

Terlaksananya tinjau ulang pelaksanaan ISO 9001:2008

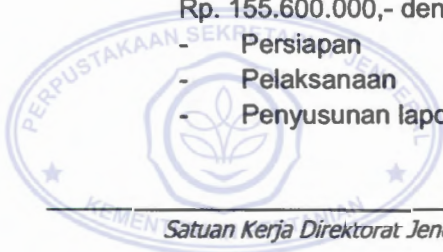
Indikator kinerja kegiatan

Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian sehingga Sertifikat ISO 9001:2008 yang sudah diberikan masih terus berlaku hingga periode surveilans selanjutnya

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 155.600.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan



Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain seta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

5.4 Pengembangan Data Base Sistem Informasi Pengolahan Pertanian

Output

Data base sistem informasi pengolahan pertanian

Outcome

Tersusunnya database sistem informasi pengolahan pertanian pada Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyusunan data base sistem informasi pengolahan pertanian pada Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui jasa konsultan, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Data base series yang digunakan sebagai salah satu acuan untuk penyusunan data base sudah tidak up to date lg sehingga keakuratan data base menjadi tidak dapat dijadikan bahan referensi dalam pengambilan keputusan.

5.5 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Output

Laporan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Outcome

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lingkup Direktorat PHP

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya laporan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lingkup Direktorat PHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 51.708.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lingkup Direktorat PHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.6 Kegiatan Penunjang Direktorat

Output

Kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian berjalan baik

Hasil

Terlaksananya Program dan Kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian berjalan baik



Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya kegiatan penunjang dengan baik dan benar pada Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.551.592.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan
- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran dan adanya perubahan atau revisi kegiatan dan anggaran.

5.7 Gelar Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

Output

Gelar teknologi pengolahan hasil pertanian

Hasil

Terlaksananya gelar teknologi pengolahan hasil pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Informasi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui gelar teknologi pengolahan hasil pertanian

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan persiapan

- Tahapan pelaksanaan
- Tahapan pembuatan laporan.

Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal PPHP yang akan merubah jadwal pelaksanaan gelar teknologi pengolahan hasil pertanian.

5.8 Konsolidasi Direktorat Mendukung Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan SDM

Output

Dukungan Manajemen dalam rangka kegiatan perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM lingkup Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian.

Hasil

Terlaksananya dukungan manajemen dalam rangka kegiatan perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM lingkup Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Perencanaan, keuangan, evaluasi dan SDM lingkup Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan dukungan perjalanan dinas paket meeting luar kota.



Analisis Resiko

Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal PPHP yang akan merubah jadwal pelaksanaan layanan perkantoran Direktorat PHP terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Direktorat lain seta adanya kebijakan dan tugas tambahan yang memerlukan waktu dan pelayanan yang diberikan pimpinan dan instansi lain.

F. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (1793.001)

1. Perencanaan Program (1793.001.001)

1.1 Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen PPHP

Output

Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen PPHP

Outcome

Tersusunnya Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen PPHP yang merupakan tuntunan instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan visi dan misi unit organisasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 709.810.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Pengumpulan Bahan
- Penyusunan Konsep awal RENSTRA
- Pembahasan Konsep
- Penyempurnaan Konsep
- Perbanyak Dokumen RENSTRA

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

1.2 Penyusunan Usulan Inisiatif Baru Kegiatan PPHP

Output

Usulan inisiatif baru kegiatan PPHP

Outcome

Tersusunnya usulan inisiatif baru kegiatan PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi program antara satker pusat dan daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 18.930.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Penyusunan laporan

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

1.3 Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Perencanaan Program Output

Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan

Outcome

Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan



Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya Rencana Kerja Tahunan merupakan bagian Rencana Strategis (lima tahunan) untuk menuntun instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan visi dan misi unit organisasi

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 391.600.000,- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Pengumpulan Bahan
- Penyusunan Konsep awal RENJA 2014
- Pembahasan Konsep
- Penyempurnaan Konsep
- Perbanyak Dokumen RENJA 2014

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

1.4 Forum Komunikasi dan Asistensi Perencanaan Program serta Sinkronisasi antar kegiatan PPHP

Output

Laporan pertemuan forum komunikasi dan asistensi perencanaan program serta sinkronisasi antar kegiatan PPHP

Outcome

Terlaksananya pertemuan forum komunikasi dan asistensi perencanaan program serta sinkronisasi antar kegiatan PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya komunikasi dan asistensi perencanaan program serta sinkronisasi antar kegiatan PPHP baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 288.760.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- o Penyusunan
- o Pelaksanaan
- o Pencetakan

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

1.5 Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015

Output

Rencana Kerja Tahunan 2015

Outcome

Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 2015

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya Rencana Kerja Tahunan merupakan bagian Rencana Strategis (lima tahunan) untuk menuntun instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan visi dan misi unit organisasi

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 246.810.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Pengumpulan Bahan
- Penyusunan Konsep awal RENJA 2015
- Pembahasan Konsep
- Penyempurnaan Konsep
- Perbanyak Dokumen RENJA 2015

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

**1.6 Penyusunan Pedoman Perencanaan Kegiatan PPHP
Output**

Pedoman Perencanaan Kegiatan PPHP

Outcome

Tersusunnya Pedoman Perencanaan Kegiatan PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya koordinasi yang berdasarkan pedoman perencanaan pemasaran hasil pertanian tahun 2014 di lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 221.290.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- o Penyusunan
- o Pelaksanaan
- o Pencetakan

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

**1.7 Verifikasi Usulan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian**

Output

Proposal/usulan kegiatan PPHP dari daerah

Outcome

Tersampainya proposal/usulan kegiatan PPHP daerah.

Indikator kinerja kegiatan

Adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang dituangkan ke dalam prposal/usulan kegiatan daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 495.540.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- o Persiapan
- o Entri data dan penerimaan e-proposal
- o Evaluasi/penilaian
- o Rekapitulasi rancangan kegiatan dan anggaran

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

1.8 Penyelenggaraan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2014

Output

Rapat kerja Ditjen PPHP 2014

Outcome

Terlaksananya rapat kerja Ditjen PPHP 2014

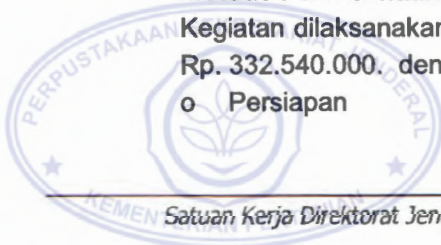
Indikator kinerja kegiatan

Adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PPHP baik pusat maupun daerah yang nantinya dituangkan oleh daerah ke dalam proposal/usulan kegiatan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 332.540.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- o Persiapan



- o Pelaksanaan
- o Pelaporan

Analisis Resiko

Tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

1.9 Kick Off Meeting Rencana Kerja Kegiatan Ditjen PPHP Tahun 2016

Output

Laporan *kick off* meeting rencana kegiatan PPHP tahun 2016

Outcome

Terlaksananya *kick off* meeting rencana kegiatan PPHP tahun 2016

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya koordinasi antara Ditjen PPHP dengan daerah calon penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 457.280.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga *kick off* meeting rencana kegiatan PPHP tahun 2016 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



1.10 Perencanaan Pengembangan Daerah Khusus (Daerah Tertinggal, Konflik, Perbatasan, MP3KI, P4B dan MP3EI)

Output

Laporan Perencanaan Pengembangan Daerah Khusus (Daerah Tertinggal, Konflik, Perbatasan, MP3KI, P4B dan MP3EI)

Outcome

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daerah Khusus (Daerah Tertinggal, Konflik, Perbatasan, MP3KI, P4B dan MP3EI)

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama pusat dan daerah upaya pengembangan daerah khusus khususnya Daerah Tertinggal, Konflik, Perbatasan, MP3KI, P4B dan MP3EI

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.018.880.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan perencanaan pengembangan daerah khusus tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

1.11 Review dan Penyusunan RENJA Ditjen PPHP

Output

Rencana Kerja (RENJA) Ditjen PPHP

Outcome

Terlaksananya Rencana Kerja (RENJA) Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya rencana kerja Ditjen PPHP 2014 dan terevaluasinya Renja Ditjen PPHP 2013.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 221.290.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- o Persiapan
- o Pelaksanaan
- o Penyusunan Laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan Review dan Penyusunan RENJA Ditjen PPHP dan penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi lapangan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2. Perencanaan Anggaran (1793.001.002)

**2.1 Sosialisasi Pedoman Umum dan Penyerahan POK
Output**

Laporan sosialisasi pedoman umum dan penyerahan POK

Outcome

Terlaksananya sosialisasi pedoman umum dan penyerahan POK

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya koordinasi antara Ditjen PPHP dengan daerah calon penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan diserahkannya POK Ditjen PPHP.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 639.280.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga sosialisasi pedoman umum dan penyerahan POK tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.2 Penyusunan Rancangan Anggaran dan Kegiatan 2015 Output

Rancangan anggaran dan kegiatan 2015

Outcome

Terlaksananya penyusunan rancangan anggaran dan kegiatan 2015

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya rancangan kegiatan dan anggaran pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk tahun 2015 baik kegiatan di daerah maupun kegiatan di pusat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 415.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan rancangan anggaran dan kegiatan 2015 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.3 Penyelesaian Revisi DIPA dan POK 2014

Output

DIPA dan POK 2014 Revisi

Outcome

Terlaksananya penyelesaian revisi DIPA dan POK baik pusat maupun daerah

Indikator kinerja kegiatan

Terselesaikannya revisi DIPA dan POK baik pusat maupun daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 151.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyelesaian revisi DIPA dan POK tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



2.4 Penyusunan RKA-KL 2015

Output

Rencana Kegiatan dan Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2015

Outcome

Terlaksananya penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2015 berdasarkan usulan E-proposal dan penyampaian proposal daerah ke Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyusunan rancangan kegiatan dan anggaran pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk tahun 2015 baik kegiatan di daerah maupun kegiatan di pusat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 441.250.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2015 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.5 Pertemuan Penyusunan RKA-KL 2015

A. Persiapan Pertemuan Penyusunan RKA-KL

Output

Laporan persiapan penyusunan RKA-KL



Outcome

Terlaksananya persiapan penyusunan RKA-KL

Indikator kinerja kegiatan

Terjalannya koordinasi antara Direktorat dan Sekretariat khususnya Bagian Perencanaan terkait dengan usulan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pusat sehingga kegiatan *top down* dan *bottom up* dapat bersinergi

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan persiapan penyusunan RKA-KL tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pertemuan penyusunan RKA-KL T.A 2015 Awal

Output

Laporan pertemuan penyusunan RKA-KL TA. 2015 awal

Outcome

Terlaksananya pertemuan penyusunan RKA-KL TA. 2015 awal

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya RKA-KL TA. 2015 sebagai acuan operasional kegiatan Ditjen PPHP baik di pusat maupun di daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 639.800.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan penyusunan RKA-KL TA. 2015 awal tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Pertemuan Finalisasi RKA-KL 2015

Output

Laporan pertemuan finalisasi RKA-KL TA. 2015

Outcome

Terlaksananya pertemuan finalisasi RKA-KL TA. 2015

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya pertemuan finalisasi RKA-KL TA. 2015 sebagai acuan operasional kegiatan PPHP baik di pusat maupun di daerah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 689.800.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan finalisasi RKA-KL TA. 2015 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

D. Tindak Lanjut Penyusunan RKA-KL

Output

Laporan tindak lanjut penyusunan RKA-KL

Outcome

Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut penyusunan RKA-KL

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama daerah dan pusat sehingga usulan-usulan kegiatan daerah yang belum tertampung saat pertemuan finalisasi RKA-KL dapat diakomodir.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 347.300.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan tindak lanjut penyusunan RKA-KL tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.6 Penyusunan Pedoman Umum Ditjen PPHP 2015

Output

Pedoman Umum Ditjen PPHP 2015

Outcome

Terlaksananya penyusunan pedoman umum Ditjen PPHP 2015

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya pedoman umum pelaksanaan program dan anggaran kinerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun 2015 sebagai bahan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kinerja serta pelaksanaan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun 2015 baik di pusat maupun di daerah.

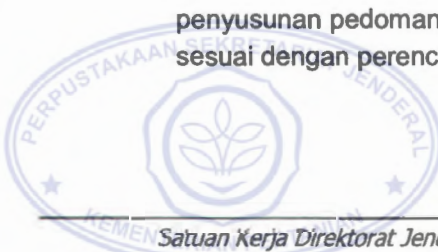
Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan pedoman umum Ditjen PPHP 2015 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



2.7 Penyusunan dan pencetakan POK TA. 2015

Output

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Ditjen PPHP TA. 20145

Outcome

Terlaksananya penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Ditjen PPHP TA. 2015

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya POK TA. 2015 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan PPHP baik di pusat maupun di daerah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 205.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan pedum tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.8 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Output

Laporan koordinasi dengan instansi terkait

Outcome

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya koordinasi dengan instansi terkait baik mitra kerja dengan Kementerian Keuangan, BAPPENAS maupun DPR

sehingga perencanaan anggaran dan keuangan dapat berjalan dengan baik

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 23.000.000. dengan menggunakan perjalanan transportasi lokal.

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga koordinasi dengan instansi terkait tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

**2.9 Pelatihan RKA-KL Lingkup Direktorat
Output**

Laporan pelatihan RKA-KL lingkup Ditjen PPHP

Outcome

Terlaksananya pelatihan RKA-KL lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlatihnya operator-operator aplikasi penyusunan RKA-KL lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 135.800.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelatihan RKA-KL lingkup Ditjen PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.10 Review RKA-KL oleh Aparat Pengawasan Intern Output

Review RKA-KL oleh Aparat Pengawasan Intern

Outcome

Terlaksananya review RKA-KL oleh Aparat Pengawasan Intern

Indikator kinerja kegiatan

Terreviewnya RKA-KL oleh Aparat Pengawasan Intern dengan menyandingkan antara RKT dan PK serta kegiatan PPHP sehingga memudahkan proses pembahasan di DJA Kemenkeu.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 288.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga review RKA-KL oleh Aparat Pengawasan Intern tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3. Kerjasama Program (1793.001.003)

3.1 Analisa Perkembangan Komoditi Internasional Untuk Penyusunan Program

Output

Laporan analisa perkembangan komoditi internasional untuk penyusunan program



Outcome

Terlaksananya analisa perkembangan komoditi internasional untuk penyusunan program

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya analisa perkembangan komoditi internasional untuk penyusunan program sehingga dapat dijadikan salah satu referensi pimpinan dalam mengambil keputusan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 302.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan analisa perkembangan komoditi internasional untuk penyusunan program tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.2 Kerjasama Antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi

Output

Laporan kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi

Outcome

Terlaksananya kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi

Indikator kinerja kegiatan

Terkoordinasikannya program dan kegiatan PPHP dengan Kementerian/Lembaga.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 944.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
- Sosialisasi Renstra Ditjen PPHP
- Analisa Tindak Lanjut Kerjasama

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.3 Pengawasan Implementasi PUG pada Program dan Kegiatan PPHP

Output

Laporan pengawasan implemenetasi PUG pada program dan kegiatan PPHP

Outcome

Terlaksananya pengawasan implemenetasi PUG pada program dan kegiatan PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terkawalnya implementasi Pengarus Utamaan Gender pada program dan kegiatan PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 496.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengawalan implemenetasi PUG pada program dan kegiatan PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.4 Workshop Nasional Agwisata

Output

Workshop Nasional Agrowisata

Outcome

Tertelaksananya Workshop Nasional Agrowisata

Indikator kinerja kegiatan

Terjadinya pembelajaran dalam capacity building dalam rangka bekal penguasaan dan keterampilan dalam pengambilan langkah-langkah pembuatan dan penelahaan perjanjian internasional.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 666.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop nasional agrowisata tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.5 Workshop Internasional Agwisata

Output

Workshop Internasional Agrowisata

Outcome

Terlaksananya Workshop Internasional Agrowisata

Indikator kinerja kegiatan

Terjadinya E-learning terkait dengan presentasi video conference negara peserta yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Fiji.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 788.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop internasional agrowisata tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

3.6 E-Learning APO

Output

Laporan E-Learning APO

Outcome

Terlaksananya E-Learning APO

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya edukasi melalui media internet dengan pihak APO

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 294.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi

- pelaksanaan e-learning APO
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan E-Learning APO tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perbendaharaan (1793.001.004)

4.1 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Satker Pusat dan Daerah Output

Laporan koordinasi pengelolaan keuangan satker pusat dan daerah

Outcome

Terlaksananya koordinasi pengelolaan keuangan satker pusat dan daerah penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Indikator kinerja kegiatan

Terkoordinasikannya pengelolaan keuangan satker pusat dan daerah penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga program dan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dapat berjalan dengan baik.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 879.340.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan satker pusat dan daerah tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.2 Penyusunan JUKLAK dan JUKNIS

Output

JUKLAK dan JUKNIS

Outcome

Tersusunnya JUKLAK dan JUKNIS Ditjen PPHP TA. 2013

Indikator kinerja kegiatan

Adanya acuan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sehingga perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 252.600.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan JUKLAK dan JUKNIS tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.3 Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Output

Laporan sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan



Outcome

Regulasi Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan antara lain Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri keuangan (PMK), Peraturan Ditjen Perbendaharaan (Perdirjen PB).

Indikator kinerja kegiatan

Adanya acuan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sehingga perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 845.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- sosialisasi peraturan keuangan
- perencanaan kas pengelolaan keuangan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.4 Inventarisasi Rekening Satker dan Verifikasi Usulan Pejabat Pengelola Keuangan

Output

Daftar rekening satker dan data pejabat pengelola keuangan penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Outcome

Terlaksananya inventarisasi daftar rekening satker dan data pejabat pengelola keuangan penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Indikator kinerja kegiatan

Terdapatnya data rekening yang valid terhadap pejabat pengelola keuangan baik pada satker pusat maupun satker daerah yang bisa menjalankan program dan kegiatan khususnya pada lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 270.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan inventarisasi data rekening satker dan data pejabat pengelola keuangan penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.5 Penyusunan dan Penyelesaian Target PNB

Output

Target dan pagu serta realisasi PNB

Outcome

Terlaksananya target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berikut realisasinya

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya PNB umum pada satker daerah dan PNB fungsional BPMA pada satker pusat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 407.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan target PNBP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.6 Sinkronisasi dan Updating Gaji Pegawai

Output

Data gaji pegawai yang telah di perbaharui

Outcome

Terlaksananya fasilitasi kerjasama pengembangan rempah dan jamu

Indikator kinerja kegiatan

Terdatanya gaji pegawai secara dinamis terkait dengan tunjangan kinerja masing masing pegawai negeri sipil lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 269.300.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sinkronisasi dan updating gaji pegawai tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

4.7 Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Satker Pusat Output

Dokumen administrasi keuangan satker pusat yang lengkap dan valid

Outcome

Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi keuangan satker pusat yang lengkap dan valid

Indikator kinerja kegiatan

Tertatanya administrasi keuangan pada setiap Direktorat dan Sekretariat terkait dengan mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 334.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan dokumen GU/TUP
- penyusunan laporan realisasi keuangan
- pengelolaan satker

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi keuangan satker pusat tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



- 5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan (1793.001.005) Penyusunan Laporan Barang Milik Negara**
5.1 Akurasi dan Verifikasi Data Barang Milik Negara

Output

Laporan akurasi dan verifikasi data barang milik negara

Outcome

Terlaksananya penggabungan data barang milik negara kedalam aplikasi

Indikator kinerja kegiatan

Tersusun dan disampaikan ADK serta kelancaran penggabungan laporan barang dalam aplikasi sistem SIMAK-BMN secara baik, akurat, tepat waktu atas barang milik negara yang bersumber dari APBN Ditjen PPHP yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 395.650.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan akurasi dan verifikasi data barang milik negara tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



5.2 Sosialisasi Penyusutan dan Likuidasi BMN Pembinaan Aplikasi Barang Persediaan

Output

Laporan sosialisasi penyusutan dan likuidasi pembinaan aplikasi barang persediaan

Outcome

Terlaksananya sosialisasi penyusutan dan likuidasi pembinaan aplikasi barang persediaan

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya informasi dan updatenya data sosialisasi penyusutan dan likuidasi pembinaan aplikasi barang persediaan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 585.250.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sosialisasi penyusutan dan likuidasi pembinaan aplikasi barang persediaan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.3 Penyusunan Registrasi Inventaris BMN

Output

Registrasi Inventaris Barang Milik Negara (BMN).



Outcome

Tercapainya penatausahaan BMN yang tertib dan teratur melalui pencetakan labelisasi/kodefikasi barang di lingkungan Ditjen PPHP.

Indikator kinerja kegiatan

Teregistrasinya BMN lingkup Ditjen PPHP 2013 sehingga data BMN dapat terkontrol pemanfaatannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 323.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- inventarisasi BMN
- pencetakan label registrasi
- pelabelan dan registrasi

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan Registrasi Inventaris Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.4 Penertiban dan Penyelesaian DIR

Output

Daftar inventaris ruangan (DIR dan DBR) serta penghapusan BMN

Outcome

Terlaksananya inventarisasi ruangan (DIR dan DBR) serta penghapusan BMN

Indikator kinerja kegiatan

Tersusun dan dipasangnya alat informasi aset/ inventaris kantor dan Teridentifikasi aset yang sudah tidak layak digunakan untuk



mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. agar dapat segera di proses penghapusan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 425.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- inventarisasi
- penertiban
- penyesuaian DBR
- penghapusan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan inventarisasi ruangan (DIR dan DBR) serta penghapusan BMN tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.5 Pemutakhiran Data Barang Milik Negara

Output

Data Barang Milik Negara (BMN) yang telah terbaru

Outcome

Terlaksananya pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN)

Indikator kinerja kegiatan

Barang Milik Negara dapat terinventarisasi dengan baik sehingga dapat menjadi referensi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.6 Penyempurnaan Pedoman Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Output

Pedoman sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Outcome

Terlaksananya penyempurnaan pedoman tata cara pengelolaan alsintan PPHP adalah pelaksanaan pembahasan dan tersusunnya buku acuan pedoman tata cara pengelolaan alsintan

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya acuan pengelolaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 286.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- pencetakan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan pedoman sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



5.7 Penertiban Satker Inaktif 2006 - 2012

Output

Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang

Outcome

ADK SIMAKBMN dana dekosentrasi dan tugas perbantuan yang telah dilakukan proses transfer keluar

Indikator kinerja kegiatan

Tersusun dan disampaikan ADK SIMAK BMN yang telah dilakukan proses transfer keluar serta draft berita acara serah terima aset, berita acara pinjam pakai dan surat pernyataan keberadaan aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengalihan pencatatan aset dari satker inaktif kepada satker aktif serta kelancaran penggabungan laporan barang dalam aplikasi sistem SIMAKBMN secara baik, akurat, tepat waktu atas barang milik negara yang bersumber dari APBN Ditjen PPHP yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah serta bagi satker inaktif dapat menyerahkan pencatatan asetnya kepada Dinas Propinsi dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas Kabupaten kepada Dinas Propinsi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.403.800.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan workshop laporan aset satker inaktif
- pelaksanaan workshop laporan aset satker inaktif
- penyusunan laporan
- penyusunan dan penetaan satker inaktif



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan Penertiban Satker Inaktif 2006–2001 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

5.8 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Ditjen PPHP

Output

Laporan administrasi pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen PPHP

Outcome

Terlaksananya pemrosesan administrasi pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Program dan kegiatan utamanya pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen PPHP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 950.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa lingkup Ditjen PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Verifikasi dan Akutansi (1793.001.006)

6.1 Koordinasi SAI

A. Persiapan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan SAI

Output

Materi workshop penyusunan laporan keuangan SAI

Outcome

Tersusunnya materi laporan keuangan dan laporan barang milik negara sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya materi workshop penyusunan laporan keuangan SAI yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SAI.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 62.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan workshop
- penyusunan laporan pelaksanaan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan persiapan workshop penyusunan laporan keuangan SAI tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pelaksanaan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II

Output

Workshop penyusunan laporan keuangan SAI.

Outcome

Tersusunnya laporan keuangan dan laporan barang milik negara sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya workshop laporan keuangan SAI yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SAI.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.503.500.000.- dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pelaksanaan workshop penyusunan laporan keuangan SAI
- penyusunan laporan

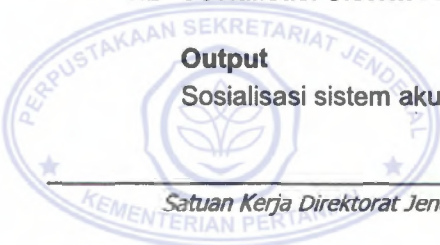
Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop penyusunan laporan keuangan SAI tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

6.2 Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintah

Output

Sosialisasi sistem akuntansi pemerintah



Outcome

Tersosialisasinya program SAP dan prosedur pelaporan kepada penanggungjawab dan petugas pembuat laporan SAK dan SIMAK-BMN

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama dan adanya pemahaman dan ketrampilan pengguna keuangan, barang milik negara ditingkat pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan dan laporan barang milik negara sesuai prosedur yang benar.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 298.900.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pertemuan sosialisasi SAP
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sosialisasi sistem akuntansi pemerintah tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

6.3 Verifikasi dan Validasi Laporan Keuangan UAKPA dan UAPPA /E-1

Output

Laporan keuangan UAKPA dan UAPPA /E-1.

Outcome

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan UAKPA dan UAPPA /E-1.



Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya laporan UAKPA dan UAPPA / E-1 yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kedepan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 874.350.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- konsinyering penyusunan laporan bulanan SAK
- konsinyering laporan triwulan SAK
- penyusunan laporan UAPPA / E-1

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan laporan keuangan UAKPA dan UAPPA / E-1 tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

6.4 Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited, Audited dan Reviu Output

Laporan Keuangan Unaudited, Audited dan Reviu

Outcome

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Unaudited, Audited dan Reviu

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 212.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan laporan unaudited
- penyusunan laporan keuangan unaudited
- penyusunan laporan keuangan reviu

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan Laporan Keuangan Unaudited, Audited dan Reviu tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

6.5 Pembinaan dan Pemantauan SAI Output

Laporan pembinaan dan pemantauan SAI

Outcome

Terlaksananya pembinaan dan pemantauan sistem akuntansi instansi

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

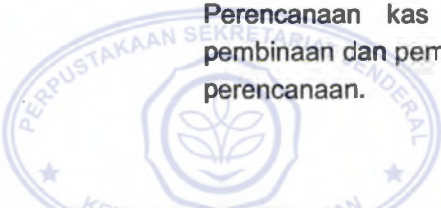
Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 217.850.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pelaksanaan pembinaan dan pemantuan SAI
- penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan SAI

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan dan pemantauan SAI tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



**7. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
(1793.001.007)**

7.1 Pengembangan Kualitas

A. Peningkatan Profesionalisme SDM

Output

Laporan peningkatan profesionalisme SDM

Outcome

Terlaksananya peningkatan profesionalisme SDM lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Meningkatnya kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral PNS dan bermanfaat dengan baik sesuai tuntutan pekerjaan atau jabatan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 467.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

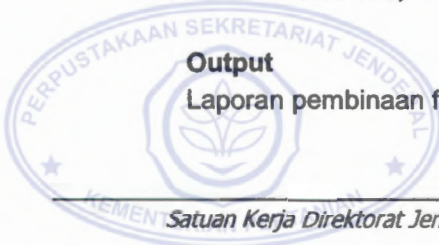
Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan peningkatan profesionalisme SDM tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pembinaan Fisik, Olah Raga, Seni dan Disiplin Pegawai

Output

Laporan pembinaan fisik, olah raga, seni dan disiplin pegawai.



Outcome

Terlaksananya pembinaan fisik, olah raga, seni dan disiplin pegawai lingkup Ditjen PPHP.

Indikator kinerja kegiatan

Kesegaran fisik dan kreatifitas seni dan serta disiplin pegawai Ditjen PPHP lebih baik.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 204.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pembuatan merchandise pembinaan fisik, olahraga, seni dan disiplin pegawai
 - fasilitasi petugas upacara
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan fisik, olah raga, seni dan disiplin pegawai tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Pembinaan Mental dan Agama

Output

Laporan pembinaan mental dan agama

Outcome

Terlaksananya pembinaan mental dan agama PNS lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan, yang efisien dan efektif berjalan dengan adanya pembinaan mental PNS lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan mental dan agama tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

D. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Output

Laporan pelatihan pengadaan barang dan jasa

Outcome

Terlaksananya pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi PNS lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlatihnya PNS lingkup Ditjen PPHP dalam rangka implementasi pengadaan barang jasa

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 255.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelatihan pengadaan barang dan jasa
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pelatihan pengadaan barang dan jasa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

E. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

Output

Diklatpim I dan II

Outcome

Terlaksananya diklatpim I dan II bagi PNS lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terdidik dan terlatihnya PNS lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui belanja jasa profesi dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pendidikan dan pelatihan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan diklatpim I dan II bagi PNS lingkup Ditjen PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

F. Character Building Peningkatan Kinerja

Output

Laporan character building peningkatan kinerja

Outcome

Terlaksananya character building peningkatan kinerja bagi PNS lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terbangunnya karakter dalam pelaksanaan reformasi birokrasi PNS lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 1.007.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan character building peningkatan kinerja tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

G. Penyempurnaan Sistem Arsip Elektrik Kepegawaian

Output

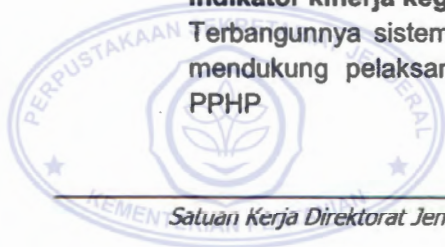
Sistem arsip elektrik kepegawaian

Outcome

Terlaksananya sistem arsip elektrik kepegawaian bagi PNS lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terbangunnya sistem arsip yang berbasis elektronik dalam upaya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi PNS lingkup Ditjen PPHP



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 115.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaa
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan character building peningkatan kinerja tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

7.2 Pengelolaan Kepegawaian

A. Pengelolaan Kepegawaian

Output

Laporan pengelolaan kepegawaian

Outcome

Terlaksananya pengelolaan kepegawaian lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyelesaian permasalahan kepegawaian, formasi, kondisi arsip dan impasing, jabfung APHP, PMHP, KP dengan baik dan benar pada Ditjen PPHP.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 915.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Data yang tidak akurat dan tidak dinamis sehingga mengakibatkan pengelolaan kepegawaian tidak berjalan dengan baik.

B. Validasi Pegawai

Output

Laporan validasi pegawai

Outcome

Terlaksananya validasi pegawai lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyelesaian permasalahan validasi kepegawaian dengan baik dan benar pada Ditjen PPHP.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Data yang tidak akurat dan tidak dinamis sehingga mengakibatkan validasi pegawai tidak berjalan dengan baik.

C. Ujian Saringan CPNS, Ujian Dinas dan KPPI

Output

Laporan ujian saringan CPNS



Outcome

Terlaksananya ujian saringan CPNS

Indikator kinerja kegiatan

Ujian saringan CPNS berjalan dengan baik dan benar

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan ujian saringan CPNS tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

7.3 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

A. Forum Pertemuan/Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Keortalaan

Output

Laporan pertemuan/sosialisasi peraturan kepegawaian

Outcome

Terlaksananya pertemuan/sosialisasi peraturan kepegawaian

Indikator kinerja kegiatan

Tersosialisasikannya peraturan kepegawaian kepada PNS lingkup Ditjen PPHP



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 371.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan/sosialisasi peraturan kepegawaian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

Output

Laporan perkembangan perubahan organisasi pemerintahan

Outcome

Terlaksananya perkembangan perubahan organisasi pemerintahan khususnya lingkup Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terjadinya perubahan paradigma terhadap organisasi yang terus berubah secara dinamis.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 217.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan perkembangan perubahan organisasi pemerintahan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

7.4 Pengembangan Jabatan Fungsional

A. Monitoring dan Evaluasi Jabfung PMHP (6 lokasi)

Output

Laporan monitoring dan evaluasi Jabfung PMHP di 6 lokasi

Outcome

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Jabfung PMHP di 6 lokasi

Indikator kinerja kegiatan

Terevaluasinya pelaksanaan tugas dan fungsi jabfung PMHP berdasarkan kompetensi pendidikan, jenjang jabatan dan formasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 994.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Persiapan
- Koordinasi dengan instansi terkait
- Kunjungan lapang
- Laporan

Analisis Resiko

Jabatan fungsional PMHP dan APHP kurang mendapat respon oleh PNS baik di pusat maupun di daerah



B. Operasional Sekretariat Jabfung PMHP dan APHP

Output

Layanan sekretariat Jabfung PMHP dan APHP

Outcome

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya operasional sekretariat jabatan fungsional dengan baik dan benar pada Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.349.550.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan operasional sekretariat jabatan fungsional PMHP dan APHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Workshop Jabatan Fungsional PMHP dan APHP

Output

Laporan workshop jabatan fungsional PMHP dan APHP

Outcome

Terlaksananya workshop jabatan fungsional PMHP dan APHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya workshop jabatan fungsional PMHP dan APHP lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 427.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop jabatan fungsional PMHP dan APHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

D. Pembuatan dan Penyempurnaan Database Jabatan Fungsional PMHP dan APHP

Output

Database Jabatan Fungsional PMHP dan APHP

Outcome

Terlaksananya penyempurnaan database Jabfung PMHP dan APHP

Indikator kinerja kegiatan

Terdatanya pejabat fungsional PMHP dan APHP terkait kepegawaian, pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pejabat fungsional PMHP dan APHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 323.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan pedoman penilai jabfung PMHP/Pleno tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

E. Penyempurnaan PERMENPAN, Peraturan Bersama MENTAN dan BKN jabatan Fungsional PMHP dan Angka Kreditnya

Output

PERMENPAN, Peraturan Bersama MENTAN dan BKN Jabfung PMHP dan Angka Kreditnya yang terbaru

Outcome

Terlaksananya penyempurnaan PERMENPAN, Peraturan Bersama MENTAN dan BKN Jabfung PMHP

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya naskah akademis, naskah matrik, juknis, dan terlaksananya studi beban kerja dan penetapan angka kreditnya bagi pejabat fungsional PMHP dan APHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 606.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyempurnaan Permentan, Peraturan Bersama bersama Mentan dan BKN Jabatan Fungsional PMHP dan angka kreditnya tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

F. Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman Penilaian jabfung PMHP dan APHP

Output

Pedoman penilaian jabfung PMHP dan APHP

Outcome

Terlaksananya penyusunan pedoman penilaian jabfung PMHP dan APHP

Indikator kinerja kegiatan

Pejabat penilai jabfung PMHP dan APHP dalam dengan mudah mengimplementasikan dalam hal penilaian DUPAK.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 422.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pedoman penilaian jabfung PMHP dan APHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

G. Pengembangan Profesionalisme Jabatan Fungsional PMHP

Output

Laporan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional PMHP

Outcome

Terlaksananya pengembangan profesionalisme jabatan fungsional PMHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlatihnya petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) PMHP dalam rangka penyelesaian tindak pidana di bidang mutu hasil pertanian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 422.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional PMHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

7.5 Reformasi Birokrasi

A. Penyusunan PMPRB, IPNBK dan SKP

Output

PMPRB, IPNBK dan SKP



Outcome

Terselenggaranya penyusunan PMPRB, IPNBK dan SKP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyusunan PMPRB, IPNBK dan SKP pada Ditjen PPHP untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 681.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan PMPRB, IPNBK dan SKP
- pengawalan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan PMPRB, IPNBK dan SKP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Penyusunan dan Penyempurnaan SOP

Output

Standart Operating Prosedure (SOP)

Outcome

Terlaksananya penyusunan *Standart Operating Prosedure* (SOP)

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya reformasi birokrasi melalui SOP pada seluruh kegiatan pada Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 371.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan Standart Operating Prosedure (SOP) tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

7.6 Apresiasi/Penyebaran Informasi di Bidang Organisasi dan Kepegawaian

A. Penyebaran Informasi Organisasi dan Kepegawaian

Output

Laporan penyebaran informasi organisasi dan kepegawaian.

Outcome

Terlaksananya penyebaran informasi organisasi dan kepegawaian.

Indikator kinerja kegiatan

Tersebarnya informasi organisasi dan kepegawaian yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penerangan kepada pegawai tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan organisasi dan kepegawaian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pembuatan banner dan
- papan digital informasi kepegawaian

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyebaran informasi organisasi dan kepegawaian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Apresiasi Kepegawaian

Output

Laporan apresiasi kepegawaian

Outcome

Terlaksananya apresiasi kepegawaian

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya penyamaan persepsi terkait peraturan-peraturan dan kaidah hukum yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta konsolidasi dan koordinasi terhadap berbagai permasalahan kepegawaian yang dihadapi para pengelola kepegawaian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 384.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pengawalan pimpinan
- fasilitasi tugas pimpinan ke daerah dan luar negeri

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan apresiasi kepegawaian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



C. Penataan Organisasi

Output

Draft organisasi

Outcome

Terlaksananya penyusunan draft organisasi intern Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya draft organisasi sebagai bahan masukan pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap penataan organisasi

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 299.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Data dan informasi serta masukan dari Direktorat terkait penataan organisasi masih masih mencerminkan kepentingan masing masing sehingga penataan organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1793.001.008)

8.1 Pengembangan Peraturan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

A. Fasilitas Perumusan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian di Bidang PPHP

Output

Laporan fasilitas perumusan rancangan peraturan/keputusan Menteri Pertanian di bidang PPHP

Outcome

Terlaksananya fasilitas perumusan rancangan peraturan/keputusan Menteri Pertanian di bidang PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Rancangan peraturan/keputusan Menteri Pertanian di bidang PPHP dapat menjadi aturan dan keputusan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 628.100.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan fasilitas perumusan rancangan peraturan/keputusan Menteri Pertanian di bidang PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



B. Penyusunan Jaringan Dokumentasi Hukum

Output

Laporan penyusunan jaringan dokumentasi hukum

Outcome

Terlaksananya penyusunan jaringan dokumentasi hukum

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya jaringan dokumentasi hukum sehingga dapat lebih memudahkan dalam pencarian suatu aturan yang terkait dengan bidang pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 122.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan jaringan dokumentasi hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

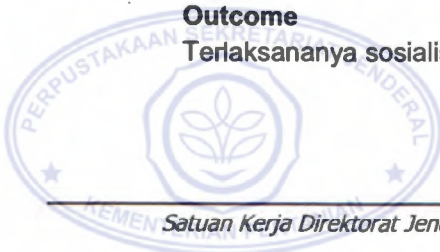
C. Sosialisasi Peraturan Bidang PPHP

Output

Laporan sosialisasi peraturan bidang PPHP

Outcome

Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang PPHP



Indikator kinerja kegiatan

Tersosialisasikannya peraturan pertanian khususnya bidang PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 477.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.2 Penyebaran Informasi

A. Temu Koordinasi Kehumasan

Output

Laporan temu koordinasi kehumasan

Outcome

Terlaksananya temu koordinasi kehumasan

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama dan koordinasi terkait bidang kehumasan lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 140.870.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan temu koordinasi kehumasan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pengelolaan Berita/Issue

Output

Kliping Berita Pertanian

Outcome

Terlaksananya penyusunan Klipping Berita Pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Informasi berita dan teknologi dalam bidang pertanian dapat tersampaikan pada pegawai lingkup Ditjen PPHP.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 298.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengelolaan berita pertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Penyusunan Buletin MIT

Output

Buletin MIT

Outcome

Terlaksananya penyusunan buletin MIT

Indikator kinerja kegiatan

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 103.320.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pencetakan MIT

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyusunan buletin MIT tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

D. Rubrikasi di Media Cetak

Output

Rubrikasi di media cetak

Outcome

Terlaksananya upaya rubrikasi di media cetak terkait bidang PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya rubrikasi di media cetak yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi PPHP



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 714.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- rubrikasi di media intern dan ekstern

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan upaya rubrikasi di media cetak terkait bidang PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

E. Konferensi, Siaran dan Kunjungan Pers, Peliputan Acara dan Dialog Interaktif

Output

Laporan konferensi, siaran dan kunjungan pers, peliputan acara dan dialog interaktif

Outcome

Terlaksananya konferensi, siaran dan kunjungan pers, peliputan acara dan dialog interaktif

Indikator kinerja kegiatan

Tersebarluasnya informasi tentang pelaksanaan kegiatan PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.524.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan konferensi, siaran dan kunjungan pers, peliputan acara dan dialog interaktif tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

F. Peningkatan Kualitas Hubungan Kerja

Output

Laporan peningkatan kualitas hubungan kerja

Outcome

Terlaksananya peningkatan kualitas hubungan kerja

Indikator kinerja kegiatan

Terjalinannya kerjasama dan hubungan kerja antar pegawai baik lingkup Ditjen PPHP maupun instansi luar

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan belanja jasa lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 378.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- peningkatan kualitas hubungan kerja
- peningkatan kualitas komunikasi personal

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan peningkatan kualitas hubungan kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



G. Media Relation

Output

Laporan pertemuan *Focus Group Discussion* (FDG) dan *Chief Editors Meeting*

Outcome

Terlaksananya pertemuan *Focus Group Discussion* (FDG) dan *Chief Editors Meeting*

Indikator kinerja kegiatan

Pelaksanaan diskusi dengan tim publikasi intern dan ekstern Ditjen PPHP dapat lebih meningkatkan kinerja dalam peliputan berita khususnya berita pertanian.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 251.250.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pertemuan *Focus Group Discussion* (FDG) dan *Chief Editors Meeting* tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.3 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

A. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Output

Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi



Outcome

Terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi

Indikator kinerja kegiatan

Tersebarluasnya informasi tentang pelaksanaan kegiatan pertanian khususnya PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 605.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.4 Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha

A. Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha

Output

Laporan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha

Outcome

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang dinamakan Caping Award

Indikator kinerja kegiatan

Upaya apresiasi terhadap pelaku usaha bidang PPHP dapat diterima oleh masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 2.334.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- penyusunan profil pengargaan
- pelaksanaan
- media awaranew

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.5 Publikasi Pembangunan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Pertanian

A. Pengelolaan Publikasi

Output

Laporan pengelolaan publikasi

Outcome

Tertaksananya pengelolaan publikasi pada Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Tertaksananya pengelolaan publikasi informasi tentang PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 436.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengelolaan publikasi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan PPHP

Output

Laporan penyelenggaraan pameran pembangunan PPHP

Outcome

Terlaksananya penyelenggaraan pameran pembangunan PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Terlaksananya pameran pembangunan PPHP yang menjadi ajang penampilan produk-produk binaan Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 619.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pameran pembangunan PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.6 Pengelolaan TU dan Rumah Tangga

Penyempurnaan Sistem Informasi Persuratan Elektronik

A. Workshop Evaluasi Elektronik Persuratan

Output

Laporan workshop informasi persuratan elektronik

Outcome

Terlaksananya workshop informasi persuratan elektronik

Indikator kinerja kegiatan

Terinformasikannya persuratan secara elektronik lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan workshop informasi persuratan elektronik tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Sinkronisasi Tata Naskah Dinas

Output

Laporan sinkronisasi tata naskah dinas

Outcome

Terlaksananya sinkronisasi tata naskah dinas

Indikator kinerja kegiatan

Tersosialisasikannya tata naskah terkait persuratan resmi dan tidak resmi pada Ditjen PPHP



Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 298.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sinkronisasi tata naskah dinas tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Pelatihan Pemberkasan Arsip

Output

Laporan pelatihan pemberkasan arsip

Outcome

Terlaksananya pelatihan pemberkasan arsip

Indikator kinerja kegiatan

Tersosialisasikannya pelatihan pemberkasan lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 334.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pelatihan pemberkasan arsip tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

D. Laporan Persuratan

Output

Laporan persuratan

Outcome

Terlaksananya penyusunan Laporan persuratan

Indikator kinerja kegiatan

Terinformasikannya persuratan lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan laporan persuratan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

E. Sosialisasi JRA dan Jadwal Relensi Arsip

Output

Laporan sosialisasi JRA dan jadwal relensi arsip

Outcome

Terlaksananya sosialisasi JRA dan jadwal relensi arsip

Indikator kinerja kegiatan

Terlatihnya penyusunan arsip pada pengelola/arsip lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 284.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyediaan bahan dan materi
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan sosialisasi JRA dan jadwal relensi arsip tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

F. Koordinasi Ketatausahaan dan Kearsipan

Output

Laporan koordinasi ketatausahaan dan kearsipan

Outcome

Terlaksananya koordinasi ketatausahaan dan kearsipan

Indikator kinerja kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan pelayanan prima pada customer/masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 316.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan



Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan koordinasi ketatausahaan dan kearsipan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.7 Pengawasan dan Supervisi Pimpinan **Supervisi Pimpinan, Percepatan Pelayanan Pimpinan, Rapat-Rapat Formal lingkup Ditjen PPHP, dan Pengadaan Bahan Keperluan Kantor**

Output

Supervisi dan dukungan manajemen pimpinan

Outcome

Terlaksananya supervisi dan dukungan manajemen pimpinan

Indikator kinerja kegiatan

Terfasilitasinya pelaksanaan kerja pimpinan dengan pelayanan prima dukungan manajemen

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 4.033.058.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- supervisi pimpinan
- percepatan pelayanan pimpinan
- rapat-rapat lingkup Ditjen PPHP
- pengadaan bahan keperluan kantor

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan supervisi dan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan pekerjaan pimpinan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.8 Pengelolaan Data dan Informasi (1793.001.011)

A. Pengelolaan Data dan Informasi

Output

Laporan pengelolaan data dan informasi

Outcome

Terlaksananya pengelolaan data dan informasi

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya data dan informasi yang obyektif, akurat dan relevan serta mudah diakses

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 914.900.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- workshop pengelolaan informasi PPHP
- pengembangan sistem basis data
- peningkatan kompetensi SDM

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Analisa Informasi PPHP

Output

Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Outcome

Terlaksananya analisa informasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Jumlah analisa data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta jumlah responden yang memanfaatkan informasi PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 504.400.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- Penyusunan Analisis Informasi Pemasaran dan Pengolahan Subsektor Tanaman Pangan (Jagung, Kedelai dan Ubi kayu) akan dilaksanakan di bulan Maret 2014 – April 2014
- Penyusunan Analisis Informasi Pemasaran dan Pengolahan Subsektor Hortikultura (Cabe Merah dan Bawang Merah) akan dilaksanakan di bulan Mei 2014 – Juni 2014
- Penyusunan Analisis Informasi Pemasaran dan Pengolahan Subsektor Perkebunan (Kakao dan Kopi) akan dilaksanakan di bulan Juli 2014 – Agustus 2014.
- Penyusunan Analisis Informasi Pemasaran dan Pengolahan Subsektor Peternakan (Telur Ayam, Daging Ayam Broiler dan Daging Sapi) akan dilaksanakan di bulan September 2014 – Oktober 2014

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan analisa informasi PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Penyebarluasan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Output

Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian



Outcome

Terlaksananya penyebaran analisa informasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Indikator kinerja kegiatan

Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 434.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- Penyusunan media informasi
- Fasilitasi Penyebaran Informasi melalui media cetak
- Fasilitasi Penyebaran Informasi melalui media elektronik
- Pembuatan Profil Ditjen PPHP

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan penyebaran analisa informasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

8.9 Pengembangan Sistem Informasi

A. Pengelolaan Website PPHP

Output

Pengelolaan website PPHP

Outcome

Terlaksananya pengelolaan website PPHP



Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya data dan informasi kinerja PPHP yang obyektif, akurat dan relevan serta mudah diakses melalui website PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 899.700.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- koordinasi tim web
- pengelolaan redaksi web
- kompilasi dan digitasi data
- workshop pengembangan website

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengelolaan website PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

B. Pengembangan Sistem Informasi

Output

Sistem Informasi PPHP

Outcome

Terlaksananya pengembangan sistem informasi PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Aplikasi sistem informasi serta pengembangan sistem jaringan server dan internet di lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 410.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pengembangan server dan jaringan

- pengembangan aplikasi perkantoran
- pengembangan e-govamance

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pengembangan sistem informasi PPHP tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

C. Pembuatan Sistem Informasi Pengajuan RIPH Online

Output

Sistem Informasi Pengajuan RIPH Online

Outcome

Terlaksananya pembuatan sistem informasi pengajuan RIPH online

Indikator kinerja kegiatan

Aplikasi sistem informasi serta pengembangan sistem jaringan server dan internet di lingkup Ditjen PPHP

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 634.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan tim teknis/pelaksana
- identifikasi dan koordinasi
- penyusunan kerangka sistem (*frame work*)
- pembuatan aplikasi pengajuan RIPH online

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembuatan sistem informasi pengajuan RIPH online tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

9. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (1793.001.012)

9.1 Penyusunan Laporan Kegiatan Ditjen PPHP

Output

Laporan kegiatan Ditjen PPHP

Outcome

Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Termonitor dan terselesaikannya laporan Ditjen PPHP serta tersedianya laporan/bahan rapat pimpinan selama 1 tahun

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 586.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan pedoman pelaporan lingkup Ditjen PPHP
- Penyusunan laporan bulanan Sekretariat Ditjen PPHP
- Penyusunan laporan bulanan Ditjen dan bahan serta materi rapat
- penyusunan laporan tahunan Sekretariat Ditjen PPHP
- penyusunan laporan tahunan Ditjen PPHP

Analisis Resiko

Tidak tersedianya informasi yang valid di Direktorat, petugas pengumpulan bahan tidak menguasai akan kebutuhan data dan terjadi perbedaan persepsi antara kebutuhan bahan dan bahan yang disiapkan sehingga akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan pimpinan dan kesalahan informasi bagi pengguna laporan



9.1 Penyusunan LAKIP

Output

LAKIP Ditjen PPHP

Outcome

Terlaksananya penyusunan LAKIP Ditjen PPHP

Indikator kinerja kegiatan

Dihasilkannya perhitungan output dan outcome kinerja Ditjen PPHP dan dibandingkan dengan sasaran target pencapaian kinerja Ditjen PPHP dan Kementerian Pertanian setiap tahun dan sampai tahun 2014.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 863.450.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- workshp SAKIP
- penyusunan pedoman SAKIP Ditjen PPHP
- pengukuran kinerja semester I
- pengukuran kinerja semester II
- penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen PPHP
- finalisasi LAKIP Sekretariat
- penyusunan LAKIP Ditjen PPHP
- finalisasi LAKIP Ditjen PPHP

Analisis Resiko

IKU eselon II yang yang berubah dari komitmen awal dan metode pengumpulan data untuk pengukuran kinerja kurang jelas atau kurang implementatif sehingga sulit menghitung kinerja direktorat yang berdampak kepada kinerja Ditjen PPHP tidak akurat.

9.2 Pengawasan Kinerja dan Tindak Lanjut Pengawasan

Output

Laporan pengawasan kinerja dan tindak lanjut pengawasan

Outcome

Terlaksananya pengawasan kinerja dan tindak lanjut pengawasan

Indikator kinerja kegiatan

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan atas Hasil Audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan, BPKP dan BPK RI sehingga nilai peta rawan penyimpangan dapat minimalis dalam rangka pencapaian Outcome Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 770.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- monitoring dan evaluasi TLHP
- penyusunan data dan laporan TLHP
- pemutakhiran data

Analisis Resiko

Lambatnya tindak lanjut LHP oleh Satuan Kerja dikarenakan kurang kepedulian terhadap pentingnya TLHP Satuan Kerja yang bersangkutan, adanya LHP yang tidak termonitoring karena Ditjen PPHP tidak selalu mendapat tembusan LHP dari BPKP perwakilan dan lambatannya pelaporan TLHP dari Satker Daerah aan kewajibannya untuk melaporkan TLHP ke Ditjen PPHP serta laporan tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan data dukung sehingga Target Ditjen PPHP dengan Predikat peta Rawan Penyimpangan

Putih tidak tercapai target Ditjen PPHP dengan predikat Peta Rawan Penyimpangan Putih tidak tercapai dan Kinerja Ditjen PPHP tidak sesuai target

9.3 Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Output

Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Outcome

Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Lingkup Ditjen PPHP.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.475.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Pengendalian Intern Satker lingkup Ditjen PPHP
- Rapat Koordinasi
- Pertemuan SPI *reward* Ditjen PPHP
- Evaluasi SPI
- Penyusunan laporan triwulan dan tahunan

Analisis Resiko

Kurangnya komitmen dari para pimpinan ttg pelaksanaan SPI dan waktu kerja Tim SPI yang terbatas karena juga harus melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta kegiatan SPI memerlukan waktu khusus untuk memeriksa dokumen dan wawancara sehingga capaian kinerja kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan dan pelaksanaan SPI mundur dari jadwal yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi (1793.001.013)

10.1 Pertemuan Evaluasi Awal Regional di 2 Lokasi

Output

Laporan pertemuan evaluasi awal regional di Bagian Barat Indonesia dan Bagian Timur Indonesia

Outcome

Terlaksananya pertemuan evaluasi awal regional di Bagian Barat Indonesia dan Bagian Timur Indonesia

Indikator kinerja kegiatan

Kehadiran jumlah satker propinsi dengan melaporkan realisasi fisik dan penyerapan anggaran, serta melaporkan permasalahan yang dihadapi dan upaya penanganannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 610.350.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan evaluasi di bagian timur Indonesia
- pelaksanaan evaluasi di bagian barat Indonesia
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan ini adalah hasilnya evaluasi kurang maksimum yang disebabkan karena peserta yang diundang tidak seluruhnya hadir, peserta yang ditugaskan untuk hadir bukan yang menangani bidang PPHP, peserta yang hadir tidak siap dengan bahan/data sesuai yang diminta dan peserta yang hadir tidak membawa form isian yang sudah dikirimkan sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga pelaksanaan tidak dapat berjalan dengan baik

10.2 Pertemuan Evaluasi Pembangunan PPHP (Nasional)

Output

Laporan pertemuan evaluasi pembangunan PPHP

Outcome

Terlaksananya pertemuan evaluasi pembangunan PPHP yang melibatkan dinas dan satker seluruh Indonesia.

Indikator kinerja kegiatan

Jumlah keberhasilan Satker Daerah yang mencapai target, yang tidak mencapai target dan kendala yang ditemui sebagai bahan perencanaan berikutnya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 394.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Resiko yang mungkin terjadi adalah pelaksanaan pertemuan evaluasi kurang lancar yang di sebabkan oleh tidak semua peserta hadir, peserta yang hadir bukan pejabat yang menangani bidang PPHP, peserta yang hadir tanpa membawa form isian perkembangan kegiatan/program serta peserta hadir tanpa membawa data yang di minta



10.3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan PPHP

Output

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan PPHP

Outcome

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan PPHP

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan PPHP Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 657.750.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Penyiapan pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja program/ kegiatan PPHP
- Pertemuan Nasional Petugas Evaluasi dan Pelaporan Satker
- Koordinasi persiapan pertemuan
- Koordinasi dan pelaporan hasil pemantauan evaluasi triwulan
- Pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pembangunan PPHP

Analisis Resiko

Tahapan kegiatan di atas yang paling dominan/kritis dalam pencapaian tujuan kegiatan adalah pada tahap penyiapan pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja program/ kegiatan PPHP, pertemuan nasional petugas evaluasi dan pelaporan satker serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pembangunan PPHP. Resiko yang mungkin terjadi antara lain adalah pedoman

yang dibuat kurang dapat diaplikasikan di lapangan, pertemuan petugas evaluasi dan pelaporan tidak berjalan dengan lancar, serta laporan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan PPHP tidak valid.

10.4 Evaluasi Pencapaian Outcome Program Peningkatan NTDS (studi kasus)

Output

Laporan evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS

Outcome

Terlaksananya evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS

Indikator kinerja kegiatan

Terevaluasinya pencapaian outcome program peningkatan NTDS yang dapat menjadikan salah satu referensi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.880.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan kuesioner
- pelatihan instruktur nasional
- pelatihan petugas
- kompilasi/tabulasi data
- workshop evaluasi

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS dalam studi kasus tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

10.5 Pembuatan Sistem Informasi Pencapaian Outcome Program Peningkatan NTDS

Output

Sistem informasi evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS

Outcome

Terlaksananya pembuatan sistem informasi evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS

Indikator kinerja kegiatan

Terbangunnya sistem informasi evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 380.500.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembuatan sistem informasi evaluasi pencapaian outcome program peningkatan NTDS tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



11. SL-PPHP (1793.001.021)

11.1 PL-1

Output

Laporan Sekolah Lapang - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP)

Outcome

Terlaksananya Sekolah Lapang - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP)

Indikator kinerja kegiatan

Terdidiknya petugas pembina serta stakeholder pada Sekolah Lapang - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP)

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.600.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pelaksanaan workshop nasional
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Peserta yang mengikuti SL-PPHP tidak kompeten dan bukan pada bidangnya sehingga materi SL-PPHP tidak dapat dipahami serta nara sumber pada SL-PPHP tidak banyak yang mempunyai waktu dalam mengajar pada SL-PPHP tersebut.

12. Pembinaan Kegiatan Strategis (1793.001.023)

12.1 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Strategis

Output

Laporan pembinaan dan pengawasan kegiatan strategis

Outcome

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan kegiatan strategis

Indikator kinerja kegiatan

Tersedianya bahan pembinaan dan pengawalan kegiatan strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan kedepannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 176.340.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- persiapan
- pengembangan kegiatan strategis nasional
- penyusunan laporan

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawalan kegiatan strategis tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

12.2 Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP)

Output

Laporan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP)

Outcome

Terlaksananya kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP)



Indikator kinerja kegiatan

Tersusunnya kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan kedepannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 6.222.500.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- pengadaan peralatan mesin pengolahan untuk pengembangan kawasan agribisnis, pengadaan kendaraan khusus cooling unit dan kendaraan pemasaran roda 3
- pengawalan dan pendampingan KAPEMBA
- pengawalan dan pendampingan KP3HP oleh Perguruan Tinggi

Analisis Resiko

Pendampingan dari lembaga perguruan tinggi pada Gapoktan penerima barang peralatan mesin pengolahan untuk kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tidak kompeten menerima bantaun tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan KP3HP tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

13. Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Melalui LM 3 (1793.002)

Output

Laporan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3)

Outcome

Terlaksananya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3)

Indikator kinerja kegiatan

Terbinanya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan kedepannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan anggaran sebesar Rp. 34.500.000.000. dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- penyusunan profil dan direktori LM3
- pameran dan promosi produk LM3
- publikasi dan penyebaran informasi
- workshop penyusunan LM3
- bantuan sarana pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Analisis Resiko

Perencanaan kas yang kurang tepat sehingga pelaksanaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.



BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ini merupakan acuan dan penjabaran yang bersifat makro, yang selanjutnya akan diuraikan lebih rinci di dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK), sehingga pengelolaan Kegiatan dan Anggaran Kinerja dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ini diharapkan kepada Penanggungjawab Satuan Kegiatan, Penanggungjawab Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk di pedomani dengan sebaik-baiknya.



